

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA
MODAL PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI



Oleh :

**NUR IMAMAH
1612321068/FEB/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2020**

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA
MODAL PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

**NUR IMAMAH
1612321068/FEB/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2020**

SKRIPSI

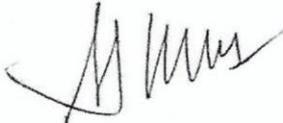
**PENGARUH DANA PERIMBANGAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA
MODAL PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Yang diajukan

**NUR IMAMAH
1612321068/FEB/AK**

Disetujui untuk Ujian Skripsi oleh

Pembimbing Utama



Dra. Ec. L. Tri Lestari, M.Si.
NIDN. 0710086701

Tanggal

19-06-2020
:

Pembimbing Pendamping



Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak.
NIDN. 0713097401

Tanggal

04-07-2020
:

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM.
NIDN. 0703106403

SKRIPSI

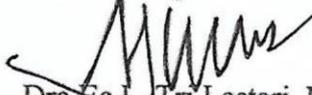
**PENGARUH DANA PERIMBANGAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA
MODAL PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR**

di susun oleh

NUR IMAMAH
1612321068/FEB/AK

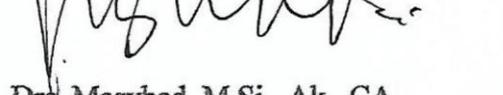
telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada tanggal 17 Juli 2020

Pembimbing
Pembimbing Utama



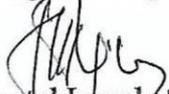
Dra. Ec L. Tri Lestari, M.Si.
NIDN. 0710086701

Tim Penguji
Ketua



Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA
NIDN. 0026105502

Pembimbing Pendamping



Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak.
NIDN. 0713097401

Sekretaris



Arief Rahman, SE., M.Si.
NIDN. 0722107604

Anggota



Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak.
NIDN. 0713097401

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM.
NIDN. 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Imamah
N.I.M : 1612321068
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul :

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA
MODAL PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, 08 Juli 2020
Yang membuat pernyataan,



Nur Imamah
NIM. 1612321068

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan petunjuk dan bimbingan serta berbagai kenikmatan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini dengan judul : **“Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur”**.

Tugas Akhir Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya. Selama proses penulisan hingga terselesaikannya Skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, arahan, dan dukungan dari beberapa pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn.) Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Arif Rahman, SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Ibu Dra. Ec. L. Tri Lestari, M.Si. selaku Pembimbing 1. Terima kasih atas bimbingan dan waktu yang telah disediakan kepada penulis. Terima kasih juga atas masukan-masukan dan kesabaran beliau dalam membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak. selaku Pembimbing 2. Terima kasih atas bimbingan dan waktu yang telah disediakan kepada penulis. Terima kasih juga atas masukan-masukan dan kesabaran beliau dalam membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama dibangku perkuliahan.
7. Seluruh Karyawan dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan pelayanan yang baik dan memberikan informasi selama penulis bergabung bersama Universitas Bhayangkara Surabaya.
8. Kepada Kedua Orang Tua dan Mertua tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'a restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
9. Kepada Suami tercinta Cahyo Sidik Prihantono yang selalu memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
10. Kepada Kakak tersayang Herdiana Silvia (Ce Diana) yang selalu memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
11. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas E Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya angkatan 2016, yang selalu bersama dan memberikan semangat selama proses perkuliahan.

12. Sahabat-sahabat terbaik Ratna Yunata dan Anyke Sumaryanti yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
13. Teman-teman tersayang Titis Dwi W.R., Fitri Siti Aisyah Lubis, Yunita Firdausi, Dika Ayu Puspitasari, Nunuk Lia Tri Rahayu, Mariska Adella Putri, Intan Hijriani Hariyanto, Dita Prakusya, Intan Fara Adibah, Yustina Irene, Rahayu Wulandari, Ramadhani Distya dan Novia Dianatul Mufida terimakasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Teman-teman KKN Desa Dukuh tersayang Putri Yayak Widianana, Anjelita Purnamawati, Enggal Dhaluas, Dini Aulia, Gita Yana, Iris Annisyah, Syahril A. Pratama, Fuji Antoro, Iqhbal Arfiansyah dan teman-teman lainnya terimakasih atas do'a dan dukungannya selama ini.

Dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Surabaya, 08 Juli 2020

Penulis



Nur Imamah

NIM. 1612321068

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori	15
2.2.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	15
2.2.2 Teori Akuntansi Dana	16
2.2.3 Otonomi Daerah	17

2.2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	19
2.2.5 Dana Perimbangan	21
2.2.5.1 Dana Alokasi Umum	22
2.2.5.2 Dana Alokasi Khusus	23
2.2.5.3 Dana Bagi Hasil.....	25
2.2.6 Pendapatan Asli Daerah	26
2.2.7 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.....	28
2.2.8 Belanja Modal	29
2.3 Kerangka Konseptual.....	31
2.4 Hipotesis	32
2.4.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal.....	33
2.4.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal..	34
2.4.3 Pengaruh Sisa lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal.....	34

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berfikir.....	36
3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	37
3.2.1 Definisi dan Pengukuran Variabel	37
3.2.1.1 Variabel Dependen (Y).....	37
3.2.1.2 Variabel Independen (X)	38
3.2.2 Operasionalisasi Variabel.....	41
3.3 Teknik Penentuan Populasi, Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	43
3.3.1 Teknik Penentuan Populasi	43
3.3.2 Besar Sampel	43
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel.....	44
3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian	45
3.5 Prosedur Pengambilan/Pengumpulan Data.....	46
3.6 Pengujian Data.....	47

3.7 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis	47
3.7.1 Statistik Deskriptif.....	48
3.7.2 Uji Asumsi Klasik	48
3.7.2.1 Uji Normalitas	48
3.7.2.2 Uji Multikolinieritas	49
3.7.2.3 Uji Autokorelasi	50
3.7.2.4 Uji Heteroskedastisitas	51
3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	52
3.7.4 Uji Hipotesis (Uji t).....	53

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	54
4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian	56
4.3 Analisis Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis.....	61
4.3.1 Statistik Deskriptif.....	61
4.3.2 Uji Asumsi Klasik	64
4.3.2.1 Uji Normalitas	64
4.3.2.2 Uji Multikolinieritas	66
4.3.2.3 Uji Autokorelasi	67
4.3.2.4 Uji Heteroskedastisitas	68
4.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	70
4.3.4 Uji Hipotesis (Uji t).....	72
4.4 Pembahasan	75
4.4.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal	75
4.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal	77
4.4.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal.....	78
4.4.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal..	79
4.4.5 Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal.....	80

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan82

5.2 Saran84

DAFTAR PUSTAKA.85

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rasio Aktivitas (Keserasian) Belanja Operasi Dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013-2017 (Dalam Triliun Rupiah).....	4
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 2.3 Formulasi Untuk Menghitung Besarnya DAU Berdasarkan Pendapatan Netto Dalam APBN	23
Tabel 3.4 Operasionalisasi Variabel.....	41
Tabel 3.5 Perhitungan Kriteria Sampel	45
Tabel 3.6 Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi Uji Durbin-Watson.....	51
Tabel 4.7 Daftar Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2018.....	55
Tabel 4.8 Laporan Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Belanja Modal Provinsi Jawa Timur tahun 2016 (Dalam Milyar Rupiah)	56
Tabel 4.9 Laporan Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Belanja Modal Provinsi Jawa Timur tahun 2017 (Dalam Milyar Rupiah)	58

Tabel 4.10 Laporan Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Belanja Modal Provinsi Jawa Timur tahun 2018 (Dalam Milyar Rupiah)	60
Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	62
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas.....	66
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinieritas	67
Tabel 4.14 Hasil Uji Autokorelasi.....	68
Tabel 4.15 Hasil Analisi Regresi Linier Berganda.....	70
Tabel 4.16 Hasil Uji Statistik t	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	32
Gambar 3.2 Kerangka Proses Berfikir.....	36
Gambar 4.3 Grafik Histogram Normalitas	64
Gambar 4.4 Uji Normalitas dengan <i>Probability Plot</i>	65
Gambar 4.5 Uji Heteroskedastisitas dengan <i>Scatterplot</i>	69

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Data Penelitian
- Lampiran 2: Data Penelitian Setelah Transformasi Logaritma Natural (LN)
- Lampiran 3: Uji Statistik Deskriptif
- Lampiran 4: Uji Normalitas Data
- Lampiran 5: Uji Multikolinieritas
- Lampiran 6: Uji Autokorelasi
- Lampiran 7: Data Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 8: Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
- Lampiran 9: Uji Statistik t
- Lampiran 10: Kartu Bimbingan
- Lampiran 11: Berita Acara Revisi Skripsi

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA
MODAL PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR**

ABSTRAK

Oleh :

Nur Imamah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah 29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur. Teknik analisa data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur, sementara Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Belanja Modal.

***THE EFFECT OF BALANCE FUNDS, REGIONAL REVENUE AND BUDGET
SURPLUS TO CAPITAL EXPENDITURE ON LOCAL GOVERNMENT
IN EAST JAVA PROVINCE***

ABSTRACT

By :

Nur Imamah

This research has a purpose to determine the effect of General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Regional Revenue and Budget Surplus to Capital Expenditure. This research uses quantitative research. The type of data uses secondary data obtained from Local Government Budget Realization Report (APBD) year period 2016-2018. The Population in this research were 29 regencies and 9 cities in East Java Province. Data analysis technique used is descriptive statistics, classical assumption test and multiple linier regression analysis. The result of this research indicate that The General Allocation Fund have no effect to Capital Expenditure On Local Government In East Java Province, while The Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Regional Revenue and Budget Surplus effect to Capital Expenditure On Local Government In East Java Province.

Keywords: *General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Regional Revenue, Budget Surplus and Capital Expenditure.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring bergulirnya era reformasi membawa perubahan yang lebih baik terutama dalam penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Pada dasarnya otonomi daerah merupakan sebuah upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan hak yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber perekonomiannya serta keuangan yang dimiliki agar digunakan seluas-luasnya bagi kesejahteraan rakyat.

Adanya kebijakan otonomi daerah menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah, dalam suatu otonomi daerah proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi hal utama dalam mengelola keuangan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dalam penyusunannya ditetapkan oleh peraturan daerah. Struktur APBD berdasarkan pernyataan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 22 ayat (1) adalah suatu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.

Sebagai upaya pemberdayaan daerah, salah satu komponen penting dari Belanja Daerah adalah Belanja Modal, belanja modal merupakan upaya

pemerintah dalam bentuk investasi untuk meningkatkan pembangunan daerah dan menyediakan sarana prasarana yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan publik, diharapkan prosentase belanja modal terus meningkat setiap tahunnya.

Proporsi belanja modal yang tepat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan efek multiplier yang berkepanjangan, setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang berbeda dalam membiayai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu tidak sedikit pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berupa Dana Perimbangan untuk mendanai kebutuhan daerahnya.

Dana Perimbangan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah guna mendanai kebutuhan daerah. Selanjutnya, Dana Alokasi Khusus dialokasikan dengan tujuan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar seperti di bidang pendidikan, kesehatan (pelayanan dasar dan pelayanan rujukan), jalan, irigasi dan prasarana pemerintahan lainnya. Dana Alokasi Umum dan dana Alokasi Khusus ini rutin diberikan dalam prosentase yang sama setiap tahunnya oleh pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan Dana Bagi Hasil dialokasikan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah, dana ini diberikan dalam prosentase tertentu dengan memperhatikan potensi masing masing daerah penghasil.

Sumber pendapatan daerah yang lainnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004). Dengan adanya Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menambah prosentase dalam investasi Belanja Modal pemerintah daerah sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan laporan realisasi kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2017, Pemerintah daerah (Perda) mengalokasikan dana berbentuk anggaran Belanja Modal ke dalam APBD guna penambahan/pemeliharaan aset tetap yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, namun tidak semuanya terealisasi dengan benar dan tepat. Belanja modal mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dalam arah pembangunan daerah, dengan mengalokasikan pendanaan yang efektif dan efisien, belanja modal mampu menjadi indikator kemakmuran pada daerah. Berikut adalah rasio aktifitas belanja operasi dan belanja modal pemerintah Provinsi Jawa Timur selama tahun 2013-2017 :

Tabel 1.1
Rasio Aktifitas (Keserasian) Belanja Operasi Dan Belanja Modal Pemerintah
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013-2017
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Belanja		Total Pendapatan	Rasio Aktifitas Belanja (%)	
	Operasi	Modal		Operasi	Modal
2013	11.434.703	1.175.751	17.372.769	65,82	6,77
2014	11.408.154	1.207.457	20.772.484	54,92	5,81
2015	12.842.602	2.258.320	22.228.450	57,78	10,16
2016	14.886.623	2.150.594	24.962.122	59,64	8,62
2017	18.522.329	3.090.056	29.879.164	61,99	10,34
Rata-rata				60,03	8,34

Sumber : Data diolah dari Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013-2016 dan Laporan Realisasi Anggaran TA. 2017 Un-Audited (*)

Dari data diatas nampak bahwa anggaran belanja pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih didominasi oleh belanja operasi. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan cukup signifikan dalam belanja modal yaitu sebesar 4.35%, namun jika dilihat dari rata-rata rasio selama 5 tahun belanja modal hanya sebesar 8,34%, terjadi selisih rata-rata yang cukup signifikan yaitu sebesar 51.69% antara belanja modal dengan belanja operasi. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah di Provinsi Jawa Timur lebih memprioritaskan belanjanya pada belanja operasi daripada belanja modal. Prosentase belanja modal cenderung kecil dibanding belanja operasi.

Sumber lain untuk membiayai belanja modal adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dinyatakan bahwa SiLPA merupakan salah satu sumber pembiayaan selain dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pinjaman daerah. SiLPA dapat digunakan sebagai dana pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan

jasa, serta belanja modal. Jumlah SiLPA yang ideal dapat digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Untuk itu dalam meningkatkan Belanja Modal terdapat beberapa faktor penentu yang harus diperhatikan pemerintah daerah antara lain Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil, juga Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ifa (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Pratama (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta masih adanya perbedaan hasil penelitian dari beberapa penelitian terdahulu, untuk itu peneliti ingin membahas tentang pengaruh dari ketiga komponen Dana Perimbangan yaitu Dana Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil serta pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur ?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur ?
3. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur ?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur ?
5. Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur.

4. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur.
5. Untuk mengetahui apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Belanja Modal.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan pembelajaran, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan kepada pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan mengenai keuangan daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol kinerja pemerintah daerah, mengenai penggunaan dana yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk Belanja Modal.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini disajikan dalam 5 (lima) bab. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, landasan teori yang menguraikan definisi tentang Otonomi Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Belanja Modal, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan kerangka konsep berfikir, definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik penentuan populasi, besar sampel dan teknik pengambilan sampel, lokasi dan waktu penelitian, prosedur pengambilan/pengumpulan data, pengujian data, serta teknis analisa data dan uji hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian, data dan deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian dan pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil analisis data.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dan saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dalam memecahkan masalah baru dalam penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Belanja Modal pemerintah :

1. Susanti dan Fahlevi (2016), dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota di Provinsi Aceh yang diamati selama 4 tahun dari tahun 2011-2014. Metode penelitian yang digunakan adalah sensus dan model analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda (*Multiple Linear Regression*). Hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi hasil (DBH) secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di kabupaten / kota di Wilayah Aceh.
2. Sari, dkk (2016), dengan judul penelitian “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh

Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali yang terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota periode tahun 2012-2015. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda (*Multiple Linear Regression*). Hasil dari peneliti membuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal, sementara Pendapatan Asli Daerah dan SiLPA berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal.

3. Ifa (2017), dengan judul penelitian “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal. Metode penelitian ini menggunakan metode sensus. Data sampel yang digunakan adalah 38 kabupaten/kota di Jawa Timur periode tahun 2010-2015. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda (*Multiple Linear Regression*). Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial variabel PAD, DAU dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan variabel DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dan secara bersama-sama PAD, DAU, DAK dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

4. Palupi dan Sulardi (2018), dengan judul penelitian “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Alokasi Belanja Modal”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap perubahan alokasi Belanja Modal. Teknik Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Sampel yang digunakan adalah 425 Kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang mempublikasikan APBD murni ataupun perubahan pada tahun 2015-2016 dan realisasi APBD tahun 2014-2015. Pengujian hipotesis penelitian ini dengan melakukan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan pengujian atas PAD, DAU, DAK, dan SiLPA terhadap perubahan alokasi Belanja Modal memiliki hasil yang positif signifikan. Sedangkan secara parsial, PAD memiliki hasil positif tidak signifikan atau tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan alokasi Belanja Modal, untuk DAU memiliki hasil negatif signifikan terhadap perubahan alokasi Belanja Modal. Namun, untuk DAK dan SiLPA memiliki hasil yang positif dan signifikan terhadap perubahan alokasi Belanja Modal.
5. Ayem dan Pratama (2018), dengan judul penelitian “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal.

Sampel yang digunakan adalah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerbitkan laporan realisasi APBD tahun 2011-2016. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Secara serentak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Terdapat persamaan dan perbedaan pada 5 (lima) penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas dengan penelitian saat ini. Berikut adalah tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu :

Tabel 2.2
Persamaan Dan Perbedaan
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh). (Susanti dan Fahlevi, 2016).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di kabupaten / kota di Wilayah Aceh.	Persamaan penelitian ini terletak pada tujuannya, yaitu sama-sama ingin mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian dan periode pengamatannya, yaitu pada penelitian sebelumnya menggunakan menggunakan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh) dengan periode pengamatan tahun 2011-2014.

2.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/ Kota Se-Bali (Sari, dkk, 2016)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal, sementara Pendapatan Asli Daerah dan SiLPA berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal.	Persamaan penelitian ini terletak pada tujuannya, yaitu sama-sama ingin mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal.	Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independen, objek penelitian dan periode pengamatannya, yaitu pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen Pertumbuhan Ekonomi dan Objek penelitian pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dengan periode pengamatan tahun 2012-2015.
3.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur (Ifa, 2017)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan variabel Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dan secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	Persamaan penelitian ini terletak pada tujuan dan objek penelitiannya, yaitu sama-sama ingin mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan SiLPA terhadap Belanja Modal dan sama-sama menggunakan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur sebagai objek penelitiannya	Perbedaan penelitian ini terletak pada periode pengamatannya, yaitu pada penelitian sebelumnya menggunakan periode pengamatan tahun 2010-2015 sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2016-2018.
4.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Alokasi Belanja Modal (Palupi dan Sulardi, 2018)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama pengujian atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan SiLPA terhadap perubahan alokasi Belanja Modal memiliki hasil yang positif signifikan. Sedangkan secara parsial, Pendapatan Asli Daerah menunjukkan	Persamaan penelitian ini terletak pada tujuannya, yaitu sama-sama ingin mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan SiLPA terhadap Belanja Modal.	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian dan periode pengamatannya, yaitu pada penelitian sebelumnya menggunakan Objek penelitian pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2014-2016.

		hasil positif tidak signifikan atau tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan alokasi Belanja Modal, untuk Dana Alokasi Umum menunjukkan hasil negatif signifikan terhadap perubahan alokasi Belanja Modal. Namun, untuk Dana Alokasi Khusus dan SiLPA menunjukkan hasil yang positif dan signifikan terhadap perubahan alokasi Belanja Modal.		
5	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. (Ayem dan Pratama, 2018)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	Persamaan penelitian ini terletak pada tujuannya, yaitu sama-sama ingin mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.	Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independen, objek penelitian dan periode pengamatannya, yaitu pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen Pertumbuhan Ekonomi dan Objek penelitian pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan periode pengamatan tahun 2011-2016.

Sumber : Peneliti, 2020

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Mathius (2016:5), *agency theory* merupakan cabang dari suatu versi *game theory* yang mempelajari suatu konsep kontraktual dan melibatkan antara dua atau lebih pihak, salah satu pihak disebut sebagai *agent* dan pihak lain disebut sebagai *principal*. *Prinsipal* memberi tanggung jawab kepada *agent* dalam

menjalankan tugasnya, sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh keduanya. Hubungan *agency theory* terhadap penelitian ini dapat dilihat dari hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dimana pemerintah pusat sebagai *principal* memberikan wewenang seutuhnya kepada pemerintah daerah sebagai *agent* untuk menjalankan pemerintahan di segala lini termasuk keuangan. Pemerintah pusat menurukan dananya berupa dana perimbangan yang bersumber dari APBN untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendanai segala kebutuhan daerahnya guna memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Teori keagenan juga terlihat dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dimana masyarakat telah memenuhi kewajibannya sebagai *principal* dengan membayar retribusi, pajak dan sebagainya untuk menambah pendapatan pemerintah daerah sehingga sebagai *agent*, pemerintah daerah harus memberikan timbal balik dengan meningkatkan fasilitas publik dari pendapatan daerah yang bersumber dari masyarakat.

2.2.2 Teori Akuntansi Dana

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, menyatakan bahwa :

“Akuntansi dana (fund accounting) merupakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain kelompok dana umum (the general fund) sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan pemerintah”.

Penggunaan akuntansi dana merupakan salah satu perbedaan utama antara akuntansi pemerintah dengan akuntansi bisnis. Sistem akuntansi dana dibuat untuk memastikan bahwa uang publik dibelanjakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Dana dapat dikeluarkan apabila terdapat otorisasi dari dewan legislatif atau karena tuntutan peraturan perundangan. Sistem akuntansi dana adalah metode akuntansi yang menekankan pada pelaporan pemanfaatan dana, bukan pelaporan organisasi itu sendiri. Terdapat dua (dua) jenis dana yang digunakan pada organisasi sektor publik (Mardiasmo, 2018:192), yaitu :

1. Dana yang dapat dibelanjakan (*expendable fund*) : digunakan untuk mencatat nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba. Jenis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi pemerintahan (*government fund*)
2. Dana yang tidak dapat dibelanjakan (*nonexpendable fund*) untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva, utang dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Jenis dana ini digunakan pada organisasi bisnis (*proprietary funds*).

Teori akuntansi dana dapat disimpulkan bahwa akuntansi dana (*fund accounting*) merupakan teori yang bisa diterapkan di pemerintah atau sektor publik karena tidak mengambil keuntungan atau laba sehingga bisa berfokus pada perolehan dana dan tujuan dana tersebut digunakan dengan baik dan maksimal.

2.2.3 Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki daerah otonom dalam hal mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Wulandari dan Iryanie (2018:1), Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, pemerintah memiliki maksud dan tujuan, salah satunya agar terjadi pemerataan dalam segala lini di daerah otonom. Otonomi Daerah menjadi indikator berkembangnya demokrasi yang lebih baik, karena dengan adanya Otonomi Daerah membuat semua aspirasi dan keluhan masyarakat dapat di dengar dan diutarakan secara langsung kepada pemerintah daerah setempat.

Dalam menjalankan Otonomi Daerah, tidak terlepas dari prinsip daerah itu sendiri. Otonomi Daerah tentunya diberikan dengan prinsip seluas-luasnya namun dengan batasan yang menyangkut fiskal nasional, politik luar negeri, keamanan dan beberapa hal lain yang tidak bisa ditangani oleh daerah dengan sendiri.

Pada pelaksanaannya adanya Otonomi Daerah ini diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat yang ada di daerah dan membuat daerah bisa lebih fokus lagi dalam mengembangkan potensi daerah yang ada. Karena sering kali pemerintah pusat memang luput pada beberapa daerah sehingga pembangunan yang ada tidak merata.

Dengan adanya Otonomi Daerah maka daerah yang mendapatkan kewenangan itu bisa melaksanakan dan memajukan potensi daerahnya, serta membuat masyarakatnya menjadi lebih sejahtera. Namun pelaksanaan dari Otonomi Daerah itu tentunya tidak boleh sampai melenceng dari Undang-Undang

yang telah ditetapkan itu. Karena meski memiliki kewenangan sendiri namun daerah yang mendapatkan Otonomi Daerah itu tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga tetap harus mengikuti aturan Undang-Undanganya.

Dasar Hukum melaksanakan Otonomi Daerah, ada beberapa dasar hukum yang harus dijalankan yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, kemudian beberapa ketetapan MPR RI, Undang-Undang No 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Diterapkannya dasar hukum tersebut dalam melaksanakan Otonomi Daerahnya supaya pemerintah daerah tidak melenceng dari aturan yang telah ada, namun tetap dapat memiliki keistimewaan dalam mengembangkan daerahnya sendiri sehingga bisa lebih maju.

2.2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 1 nomor 9 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut Siregar (2015: 29), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemda, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya

guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud (Mamesh, 1995:20 dalam Halim dan Kusufi, 2014:36).

Dari definisi tersebut, menunjukkan bahwa APBD sebagai anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur berikut :

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara terperinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan target maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran, biasanya satu tahun.

Pada era reformasi keuangan daerah, mengisyaratkan agar laporan keuangan semakin informatif. Bentuk APBD mengalami perubahan yang cukup mendasar, bentuk APBD terbaru terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pos pembiayaan merupakan usaha agar APBD semakin informatif, yaitu memisahkan pinjaman dan pendapatan daerah. Selain itu pos pembiayaan juga merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan defisit anggaran. Dalam APBD, pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut dikelompokkan kembali menjadi berikut ini (Halim dan Kusufi, 2014:37) :

1. Pendapatan Daerah, dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah.
2. Belanja, dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut :
 - a. Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah. belanja tidak

- langsung diklasifikasikan menjadi belanja pegawai yang berisi gaji dan tunjangan pejabat dan PNS daerah, belanja subsidi, belanja bunga, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
- b. Belanja langsung, yaitu belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja langsung dikelompokkan menjadi belanja pegawai yang berisi honorarium dan penghasilan terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
3. Pembiayaan, dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan, yaitu sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan yaitu sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan. Sedangkan sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah terdiri atas pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan dan sisa lebih anggaran tahun yang sedang berlangsung.

2.2.5 Dana Perimbangan

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota sangat bergantung terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menyatakan bahwa Dana Perimbangan merupakan Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi. Dana perimbangan disebut juga *transfer* atau *grants*. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah (Wulandari dan Iryanie, 2018:10).

Dana Perimbangan dipisahkan menjadi 3 jenis yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil, adanya dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004).

2.2.5.1 Dana Alokasi Umum

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Halim (2014: 124), Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersifat “*Block Grant*” yang artinya ketika dana tersebut diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Besaran alokasi DAU per daerah dihitung menggunakan rumus/formulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN yang kemudian disalurkan kepada provinsi sebesar 10% dan kabupaten atau kota sebesar 90% dari total DAU. Untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel formulasi untuk menghitung besarnya DAU berdasarkan pendapatan netto dalam APBN :

Tabel 2.3
Formulasi Untuk Menghitung Besarnya DAU
Berdasarkan Pendapatan Netto Dalam APBN

Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam hal Dana Alokasi Umum (DAU) belum dapat dihitung secara kuantitatif		
Besarnya DAU	DAU untuk Provinsi	DAU untuk Kabupaten dan Kota
$26\% \times \text{APBN}$	$10\% \times 26\% \times \text{APBN}$	$90\% \times 26\% \times \text{APBN}$

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

2.2.5.2 Dana Alokasi Khusus

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005, menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Siregar (2015 : 144), Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar.

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan mekanisme pengalokasian DAK adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Pengalokasian DAK
 - a. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD;
 - b. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah;

- c. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.
2. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:
 - a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK;
 - b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.
3. Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
4. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
5. Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Berdasarkan PMK tersebut, Menteri Teknis menyusun Juknis penggunaan DAK.

Pengalokasian DAK dimaksudkan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan (pelayanan dasar dan pelayanan rujukan), jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan prasarana perdesaan, serta perdagangan. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

2.2.5.3 Dana Bagi Hasil

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil merupakan Dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip *Based on Actual Revenue*, maksudnya adalah penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 Undang-Undang 33 Tahun 2004). Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Menurut Wulandari dan Iryanie (2018:11), Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari :

- a. Kehutanan;
- b. Pertambangan umum;
- c. Perikanan;
- d. Pertambangan minyak bumi;
- e. Pertambangan gas bumi; dan
- f. Pertambangan panas bumi

Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Pembagian DBH dilakukan berdasarkan atas daerah asal (*by origin*), sebagian penerimaan yang diperoleh dari daerah penghasil harus diberikan dan dinikmati oleh daerah penghasil yang bersangkutan.

2.2.6 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 nomor 18 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Siregar (2015:31), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Dari kedua penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang berasal dari potensi masing-masing daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah. Pendapatan Asli Daerah meliputi hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD.

Menurut Halim (2014:101-104), kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

a) Pajak Daerah.

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut :

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Pajak kendaraan di air
3. Bea balik nama kendaraan bermotor
4. Bea balik nama kendaraan di air
5. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
6. Pajak air permukaan
7. Pajak rokok

Jenis pajak kabupaten/kota tersusun dari pajak berikut:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan

6. Pajak pengambilan bahan galian golongan c.
7. Pajak lingkungan
8. Pajak mineral bukan logam batuan
9. Pajak parkir
10. Pajak sarang burung walet
11. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
12. BPHTB

b) **Retribusi Daerah**

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. **Retribusi jasa umum**

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. **Retribusi jasa usaha**

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

3. **Retribusi perizinan tertentu**

Retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c) **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah**

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN; dan
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau milik kelompok usaha masyarakat.

d) **Lain-lain PAD yang sah**

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas.

Pendapatan Asli Daerah bertujuan agar pemerintah daerah dapat menggali potensi daerah secara mandiri yang menjadi sumber pendanaan daerah sebagai perwujudan dan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi.

2.2.7 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja, serta penerimaan dan pembiayaan dalam APBD pada satu periode anggaran.

SiLPA mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 137 menyatakan bahwa, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
3. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan

SiLPA merupakan suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah, karena SiLPA akan berbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan.

2.2.8 Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, menyatakan bahwa Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Belanja modal adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014).

Menurut Pedirjen Perbendaharaan suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila :

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Perolehan aset tetap tersebut dibuatkan bukan untuk dijual.

Menurut Siregar (2015:167-168), Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap. Dalam akuntansi berbasis akrual, pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dikategorikan sebagai aset tetap. Karena itu tidak ada istilah “beban modal” sebagai padanan dari belanja modal. Alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat di daerah bersangkutan. Kategori belanja modal sesuai dengan kategori aset tetap, yaitu :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya anggaran yang digunakan untuk pengadaan/pembebasan/pembelian, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. Sedangkan belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan bukan gedung merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan tanah seperti lapangan olah raga, parkir, penimbungan barang, pemancar, bangunan jalan, bangunan air, bangunan instalasi, dan lain-lain.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran /biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kepastian sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan biaya untuk penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan sarana dan prasarana yang berfungsi atau merupakan bagian dari jaringan pengairan (termasuk jaringan air bersih), jaringan instalasi/distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi serta jaringan lain yang berfungsi sebagai sarana dan prasarana fisik instalasi/distribusi.

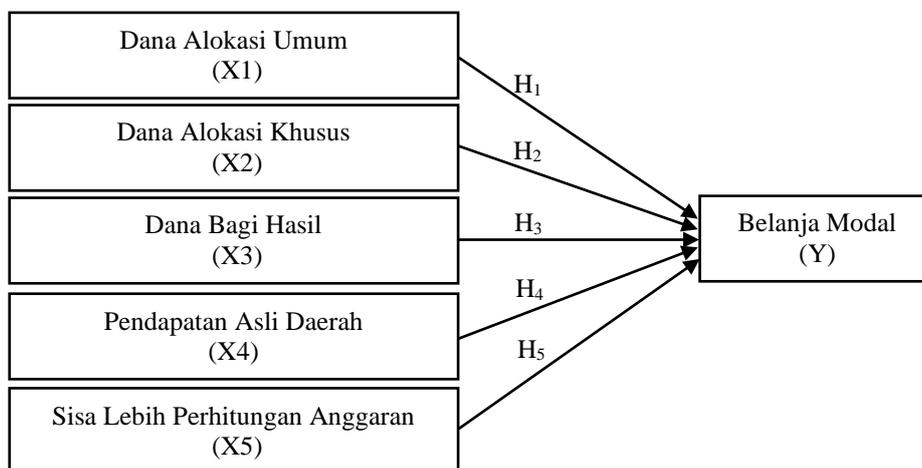
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya adalah pengeluaran untuk pengadaan aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya meliputi buku, terbitan, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, alat olah raga lainnya, hewan, dan tanaman. Terbitan meliputi terbitan-terbitan berkala dan buku laporan. barang-barang perpustakaan meliputi peta, manuskrip, musik, karya grafika, microform, rekaman suara, berkas komputer, rekaman video, tascam dan lain-lain.

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2016:94), Kerangka konseptual adalah sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah di deskripsikan. Dalam penelitian ini, terdapat 5 (lima) variabel yang di duga berpengaruh terhadap Belanja Modal, adapun variabel tersebut adalah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebagai variabel independen. sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Belanja Modal.

Gambar 2.1 menyajikan kerangka konseptual hubungan antar variabel dalam penelitian ini :



Sumber : Peneliti (2020)

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Keterangan :

→ = Menjelaskan hubungan secara parsial

X1–X5 = Variabel *independent* (bebas)

Y = Variabel *dependent* (terikat)

H₁–H₅ = Hipotesis

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:99), Hipotesis merupakan jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian dan belum jawaban secara empirik. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga yang harus dibuktikan kebenarannya melalui pengujian menggunakan data yang dikumpulkan dalam penelitian.

2.4.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan kegiatan pelaksanaan desentralisasi. Dalam *agency theory* pemerintah pusat bertindak sebagai *principal* yang telah memberikan sumber pendapatan berupa dana perimbangan kepada pemerintah daerah (*agent*) dan menuntut agar dana perimbangan yang telah di transfer ke daerah digunakan sebaik mungkin dengan meningkatkan pelayanan dan fasilitas publik kepada masyarakat melalui pengalokasian belanja modal. Dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah dapat menjadi indikator bahwa pemerintah daerah belum mampu mandiri atau masih memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dana perimbangan yang akan di teliti adalah mencakup semua komponen dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Pada penelitian yang dilakukan Susanti dan Fahlevi (2016) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal dan pada penelitian yang dilakukan Palupi dan Sulardi (2018) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang diajukan, yaitu :

H₁ : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H₂ : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H₃ : Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2.4.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Dalam *agency theory*, pemerintah daerah sebagai *agent* memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat dengan diberikannya wewenang dari Masyarakat sebagai *principal* yang telah memberi sumber dana kepada pemerintah berupa pajak, retribusi dan lain-lain dalam mengatur dan menjalankan keuangan daerah otonominya. Maka untuk mewujudkan terciptanya kesejahteraan masyarakat dan untuk membiayai segala pembangunan/infrastruktur, sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal, Pemerintah daerah dituntut mampu memaksimalkan potensi daerah dan menggali Pendapatan Asli Daerah sebesar-besarnya. Pada penelitian Susanti & Fahlevi (2016), Sari, dkk (2016) dan Ifa (2017) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa besarnya PAD menjadi faktor penentu dalam menentukan belanja modal.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang diajukan, yaitu :

H₄ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2.4.3 Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal

SiLPA hanya terbentuk bila terjadi surplus dalam APBD dan terjadi Pembiayaan Neto yang positif dimana komponen penerimaan lebih besar dari

komponen pengeluaran pembiayaan, adanya surplus dalam APBD yang disebut sebagai SiLPA akan dijadikan sebagai sumber pendanaan pada periode selanjutnya sehingga SiLPA tahun anggaran sebelumnya memiliki pengaruh pada pengalokasian APBD periode selanjutnya. Dalam periode selanjutnya SiLPA akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Pada penelitian Sari, dkk (2016), Ifa (2017), dan Palupi dan Sulardi (2018) menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang diajukan, yaitu :

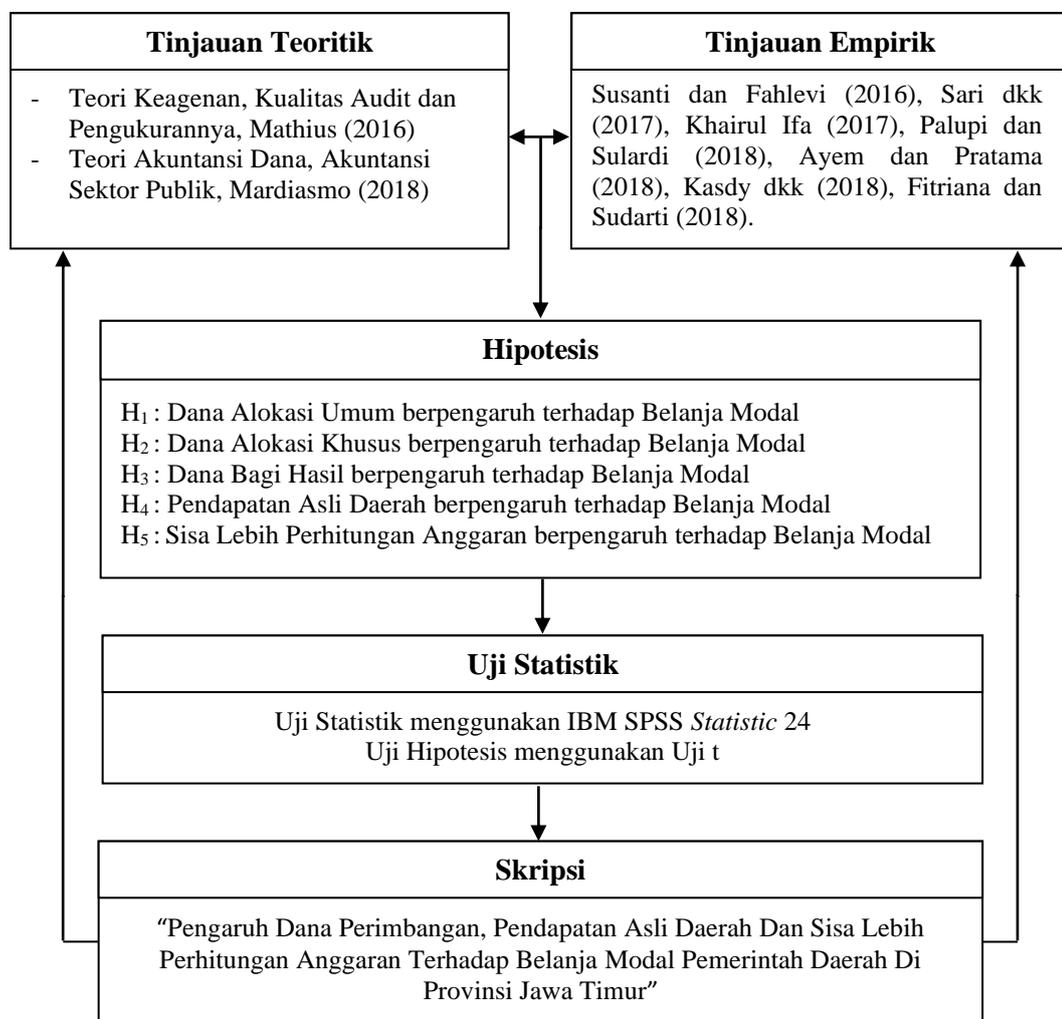
H₅ : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berfikir

Kerangka proses berpikir disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Berikut adalah kerangka proses berpikir dalam penelitian ini :



Sumber : Peneliti (2020)

Gambar 3.2
Kerangka Proses Berfikir

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.2.1 Definisi dan Pengukuran Variabel

Menurut Sugiyono (2015:38), Operasional variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan dalam mengumpulkan data

Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, berikut adalah definisi operasional dari variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian ini :

3.2.1.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen sering juga disebut variabel terikat yang merupakan variabel yang dijelaskan atau yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen yang diteliti, yaitu :

1. Belanja Modal (Y)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Indikator dalam pengukuran Belanja Modal dapat dilakukan dengan perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Belanja modal} = & \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \\ & \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan,} \\ & \text{Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya} \end{aligned}$$

3.2.1.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen sering juga disebut variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent* yang kemudian dalam bahasa Indonesia memiliki arti variabel bebas yang merupakan variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel independen yang di teliti, yaitu :

1. Dana Alokasi Umum (X1)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Indikator dalam pengukuran Dana Alokasi Umum dapat dilakukan dengan perhitungan :

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Keterangan :

$$\text{Celah fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal (KbF)} - \text{Kapasitas Fiskal (KpF)}$$

$$\text{Kebutuhan Fiskal} = \text{Total Belanja Daerah (TBD)} \times ((\% \text{ Jumlah Penduduk}) + (\% \text{ Luas Wilayah}) + (\% \text{ Invers Indeks Pembangunan Manusia (IPM)}) + (\% \text{ Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)}) + (\% \text{ Pendapatan Domestik Regional Bruto}))$$

$$\text{Kapasitas Fiskal} = (\% \text{ Pendapatan Asli Daerah}) + (\% \text{ Dana Bagi Hasil})$$

Alokasi Dasar = Gaji PNS Daerah

2. Dana Alokasi Khusus (X2)

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005).

Perhitungan Dana Alokasi Khusus setiap daerah harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis sebagai berikut :

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD;
2. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah;
3. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

Dana Alokasi Khusus dari masing-masing pemerintah kabupaten dan kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

3. Dana Bagi Hasil (X3)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil (Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005). Indikator dalam pengukuran Dana Bagi Hasil dapat dilakukan dengan perhitungan :

1. DBH Pajak
2. DBH Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

DBH dapat diukur dengan Perhitungan :

$$\text{DBH} = \text{Bagi Hasil Pajak} + \text{Bukan Pajak}$$

4. Pendapatan Asli Daerah (X4)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikator dalam pengukuran Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan perhitungan :

$$\text{PAD} = \text{Total pajak daerah} + \text{total retribusi daerah} + \text{total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{lain-lain pendapatan daerah yang sah}$$

5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X5)

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Indikator dalam pengukuran SiLPA dapat dilakukan dengan perhitungan :

$$\text{SiLPA} = \text{Surplus/Defisit} + \text{Pembiayaan Neto}$$

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Operasionalisasi variabel dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Instrumen Penelitian	Skala
1	Dana Alokasi Umum (X1)	Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka	Celah Fiskal + Alokasi Dasar Keterangan : Celah fiskal = Kebutuhan Fiskal (KbF) – Kapasitas Fiskal(KpF) (Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005)	Dokumentasi berupa Laporan Realisasi APBD Tahun 2016-2018	Rasio

		pelaksanaan desentralisasi. (Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005)			
2	Dana Alokasi Khusus (X2)	Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005)	Perhitungan alokasi DAK tahapan, yaitu, Penentuan Daerah tertentu yang menerima DAK. - Kriteria Umum (KU) - Kriteria Khusus (KK) - Kriteria Teknis (KT) (Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005)	Dokumentasi berupa Laporan Realisasi APBD Tahun 2016-2018	Rasio
3	Dana Bagi Hasil (X3)	Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. (Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005)	Bagi Hasil Pajak + Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) (Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005)	Dokumentasi berupa Laporan Realisasi APBD Tahun 2016-2018	Rasio
4	Pendapatan Asli Daerah (X4)	Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014)	Total pajak daerah + total retribusi daerah + total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain-lain pendapatan daerah yang sah (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014)	Dokumentasi berupa Laporan Realisasi APBD Tahun 2016-2018	Rasio
5	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X5)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Surplus/ Defisit + Pembiayaan Neto (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Dokumentasi berupa Laporan Realisasi APBD Tahun 2016-2018	Rasio
6	Belanja Modal (Y)	Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010)	Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010)	Dokumentasi berupa Laporan Realisasi APBD Tahun 2016-2018	Rasio

Sumber : Peneliti, 2020

3.3 Teknik Penentuan Populasi, Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Teknik Penentuan Populasi

Menurut Sugiyono (2016:80), Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang di ambil dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipublikasikan oleh 29 Daerah Kabupaten dan 9 Daerah Kota di Provinsi Jawa Timur.

3.3.2 Besar Sampel

Menurut Sugiyono (2016:81), sampel adalah :

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus representatif (mewakili)”.

Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah data Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Belanja Modal pada Laporan Realisasi APBD Pemerintah Dearah di Provinsi Jawa Timur Tahun Periode 2016-2018.

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2016:81), Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik yang digunakan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan adanya kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2016:85).

Ada beberapa pertimbangan dalam pengambilan sampel sebagai berikut :

1. 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang diambil merupakan 38 Kabupaten/Kota yang menerbitkan data lengkap sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti selama periode 2016-2018.
2. Jangka waktu 3 tahun diambil dengan alasan bahwa nilai Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Belanja Modal pada tahun 2016-2018 sudah menjadi angka pasti sedangkan 2018 keatas masih menggunakan angka sementara berdasarkan terbitan Jawa Timur.
3. Jumlah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Belanja Modal yang tidak (-) minus dan tidak (0) nol.

Adapun kriteria tertentu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perhitungan Kriteria Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018	38
2	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang tidak menampilkan Dana Alokasi Umum 2016-2018	(0)
3	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Timur yang tidak menampilkan Dana Alokasi Khusus 2016-2018	(0)
4	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Timur yang tidak menampilkan Dana Bagi Hasil 2016-2018	(0)
5	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Timur yang tidak menampilkan Pendapatan Asli Daerah 2016-2018	(0)
6	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Timur yang tidak menampilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2016-2018	(0)
7	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Timur yang tidak menampilkan Belanja Modal 2016-2018	(0)
8	Jumlah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, SiLPA dan Belanja Modal yang (-) minus dan (0) nol.	(0)
Jumlah sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur		38
Periode 2016 – 2018		3
Unit sampel (38 x 3)		114

Sumber : Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel kriteria sampel di atas, maka dapat diperoleh jumlah sampel sebanyak 38 daerah Kabupaten/Kota dengan periode penelitian selama 3 tahun yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Oleh karena itu, keseluruhan unit sampel dalam penelitian ini yaitu 38 daerah Kabupaten/Kota x 3 tahun = 114 unit sampel.

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Timur dan dilakukan di situs resmi Dirjen

Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengambil data laporan realisasi APBD selama periode 2016-2018. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Februari - April 2020

3.5 Prosedur Pengambilan/Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan prosedur yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi. Adapun prosedur untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Salah satu prosedur dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2016-2018.

2. Riset Internet (*Online Research*)

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur dan dipublikasikan dalam situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.djpk.depkeu.go.id).

3. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mengkaji berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, artikel-artikel dan penelitian sejenis dengan tujuan memperoleh landasan teoritis yang digunakan sebagai pedoman terkait kajian-kajian yang dibahas dalam penelitian.

3.6 Pengujian Data

Setelah data dikumpulkan, data tersebut dilakukan serangkaian tes pengujian data. Dalam penelitian ini pengujian data dilakukan dengan menggunakan bantuan *software* IBM SPSS Statistics 24. SPSS (*Statistical Package for Social Science* atau Paket Statistik untuk Ilmu Sosial) merupakan program aplikasi komputer yang digunakan untuk menganalisa data statistik baik statistik parametrik maupun non-parametrik.

3.7 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016:147), analisis data adalah :

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”.

Analisis data digunakan untuk mengolah data menjadi informasi, sehingga data menjadi lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018, teknik analisa data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Untuk uji asumsi klasik menggunakan 4 (empat) uji yaitu uji normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heterokedastisitas, kemudian untuk pengujian hipotesis menggunakan uji statistik t (Uji t).

3.7.1 Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono(2016:147), Statistika deskriptif adalah statistika yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membentuk kesimpulan yang berlaku bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2018:19). Dalam penelitian ini statistik deskriptif yang digunakan meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi dari klasifikasi masing-masing variabel.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Dalam analisis grafik salah satu cara termudah melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.

Metode lain yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2018:161).

Pengujian normalitas residual dengan cara uji statistik dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-smirnov* (Ghozali, 2018:165-167). Pada uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-smirnov*, data yang dikatakan berdistribusi normal jika koefisien *asympt.Sig (2 tailed)* lebih besar dari 0.05 ($\alpha=5\%$).

3.7.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi yaitu dapat dilihat dari (1) nilai *Tolerance* dan lawannya (2) *Variance Inflation Factor* (VIF) (Ghozali, 2018:107).

Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinier adalah nilai *Tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 . Tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen apabila nilai *Tolerance Value* ≥ 0.10 atau nilai VIF ≤ 10 (Ghozali, 2018:108).

3.7.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2018:111).

Pada data runtut waktu (*time series*) masalah autokorelasi sering ditemukan karena “gangguan” pada seseorang individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya, sedangkan pada data *crosssection* (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena “gangguan” pada observasi yang berbeda yang berasal dari individu/kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidanya autokorelasi yaitu dengan *uji durbin watson (DW test)*. Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen (Ghozali, 2018:112). Berikut adalah tabel keputusan ada tidaknya autokorelasi :

Tabel 3.6
Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi
Uji Durbin-Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No desicion</i>	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	<i>No desicion</i>	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi, Positif atau negatif	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber : Ghozali (2018:112)

3.7.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali: 2018:137).

Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized* (Ghozali, 2018:144). Dasar analisisnya yaitu :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan metode regresi linier berganda, yaitu metode yang digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Hubungan variabel dapat ditulis dalam persamaan linier sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y	= Belanja Modal
α	= Konstanta
$\beta_1 \dots \beta_5$	= Slope atau koefisien regresi
X_1	= Dana Alokasi Umum
X_2	= Dana Alokasi Khusus
X_3	= Dana Bagi Hasil
X_4	= Pendapatan Asli Daerah
X_5	= Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
ε	= Error

3.7.4 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai statistik t dan menggunakan signifikansi level 0.05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka hipotesis diterima (variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen).
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 maka hipotesis ditolak (variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Jawa Timur merupakan salah satu dari enam provinsi yang ada di Pulau Jawa dan terletak di bagian paling timur Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Surabaya. Secara Geografis Provinsi Jawa Timur terletak antara 7,12° Lintang Selatan hingga 8,48° Lintang Selatan dan antara 111,0° Bujur Timur hingga 114,4° Bujur Timur. Pada bagian utara Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa, bagian timur berbatasan dengan Selat Bali, bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan bagian barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Wilayah Administratif Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 Kabupaten, 9 Kota, 666 Kecamatan, dan 8.501 Desa/Kelurahan dengan luas keseluruhan wilayah adalah 47.803,49 km², sebagian besar wilayah Jawa Timur terdiri dari 90% wilayah daratan dan 10% wilayah kepulauan. Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah paling luas adalah Kabupaten Banyuwangi yaitu sekitar 5.782,4 km². Sedangkan yang memiliki luas paling kecil adalah Kota Mojokerto dengan luas wilayah 16,47 km². Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur tercatat pada tahun 2019 berjumlah sekitar 39,699 juta jiwa. Kepadatan penduduk per km² sebesar 831 jiwa/km². Jumlah penduduk yang paling banyak terdapat di Kota Surabaya dengan jumlah sekitar 2,896 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kota Mojokerto dengan jumlah sekitar 129 ribu jiwa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal pada tahun 2016 – 2018. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, terdapat 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 – 2018 yang memenuhi kriteria untuk dijadikan populasi. Berikut daftar nama Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016-2018 yang dijadikan populasi dalam penelitian ini, yaitu :

Tabel 4.7
Daftar Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2016-2018

No	Nama Kabupaten/Kota	No	Nama Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Bangkalan	20	Kabupaten Pasuruan
2	Kabupaten Banyuwangi	21	Kabupaten Ponorogo
3	Kabupaten Blitar	22	Kabupaten Probolinggo
4	Kabupaten Bojonegoro	23	Kabupaten Sampang
5	Kabupaten Bondowoso	24	Kabupaten Sidoarjo
6	Kabupaten Gresik	25	Kabupaten Situbondo
7	Kabupaten Jember	26	Kabupaten Sumenep
8	Kabupaten Jombang	27	Kabupaten Trenggalek
9	Kabupaten Kediri	28	Kabupaten Tuban
10	Kabupaten Lamongan	29	Kabupaten Tulungagung
11	Kabupaten Lumajang	30	Kota Blitar
12	Kabupaten Madiun	31	Kota Kediri
13	Kabupaten Magetan	32	Kota Madiun
14	Kabupaten Malang	33	Kota Malang
15	Kabupaten Mojokerto	34	Kota Mojokerto
16	Kabupaten Nganjuk	35	Kota Pasuruan
17	Kabupaten Ngawi	36	Kota Probolinggo
18	Kabupaten Pacitan	37	Kota Surabaya
19	Kabupaten Pamekasan	38	Kota Batu

Sumber : jatimprov.go.id, 2020

4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Belanja Modal, perhitungan terhadap variabel-variabel terkait didapatkan dari Laporan Realisasi APBD pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, yang diperoleh melalui situs resmi Departemen Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat, yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id. Sebelum melakukan pengujian antara variabel independen dengan variabel dependen, deskripsi data mengenai keenam variabel tersebut diperlukan, berikut adalah tabel data yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, yaitu :

Tabel 4.8
Laporan Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Belanja Modal Provinsi Jawa Timur tahun 2016
(Dalam Milyar Rupiah)

No.	Kota/Kabupaten	DAU	DAK	DBH	PAD	SiLPA	Belanja Modal
1	Kab. Bangkalan	1.012.243	253.398	89.024	200.083	197.494	412.823
2	Kab. Banyuwangi	1.400.385	357.337	89.415	367.873	371.733	911.584
3	Kab. Blitar	1.128.511	402.371	68.121	224.107	284.511	692.719
4	Kab. Bojonegoro	949.118	135.279	909.808	340.408	333.422	967.917
5	Kab. Bondowoso	926.596	299.831	71.334	177.026	180.838	425.425
6	Kab. Gresik	923.469	263.751	149.469	715.481	117.440	413.340
7	Kab. Jember	1.709.893	430.503	138.965	524.138	437.466	460.451
8	Kab. Jombang	1.111.301	282.845	85.304	374.141	336.446	364.902
9	Kab. Kediri	1.242.231	308.560	97.027	339.114	510.816	612.052
10	Kab. Lamongan	1.166.656	443.757	98.268	403.474	189.685	616.500
11	Kab. Lumajang	990.248	226.587	69.373	242.112	312.815	347.886
12	Kab. Madiun	893.566	332.026	61.283	163.635	253.895	443.808
13	Kab. Magetan	916.052	264.423	60.434	165.618	166.991	286.944
14	Kab. Malang	1.694.885	468.165	145.220	502.755	352.094	683.932

No.	Kota/Kabupaten	DAU	DAK	DBH	PAD	SiLPA	Belanja Modal
15	Kab. Mojokerto	991.180	243.361	80.809	447.621	381.068	442.333
16	Kab. Nganjuk	1.078.696	282.446	76.917	323.045	343.339	447.730
17	Kab. Ngawi	1.058.208	335.764	74.196	195.606	347.309	355.375
18	Kab. Pacitan	807.908	222.389	56.877	150.466	146.414	379.167
19	Kab. Pamekasan	862.936	346.061	91.983	178.479	253.232	544.166
20	Kab. Pasuruan	1.200.612	356.154	274.973	480.759	543.331	838.440
21	Kab. Ponorogo	1.062.583	325.256	68.101	240.111	171.441	376.403
22	Kab. Probolinggo	977.570	248.073	95.148	221.719	258.206	289.648
23	Kab. Sampang	827.953	328.942	74.205	135.786	228.816	564.000
24	Kab. Sidoarjo	1.225.261	307.379	157.448	1.335.284	574.241	809.998
25	Kab. Situbondo	821.084	276.738	74.029	173.836	191.177	416.864
26	Kab. Sumenep	1.110.488	281.373	128.058	208.982	291.286	272.015
27	Kab. Trenggalek	901.380	250.012	65.902	182.174	233.658	362.840
28	Kab. Tuban	1.046.759	278.716	118.421	364.133	294.019	464.180
29	Kab. Tulungagung	1.172.558	477.440	76.716	342.571	284.805	574.341
30	Kota Blitar	428.744	137.391	56.541	131.920	95.456	203.372
31	Kota Kediri	617.781	98.911	125.649	238.318	535.712	381.846
32	Kota Madiun	511.375	140.847	65.339	173.236	339.135	246.395
33	Kota Malang	859.678	94.814	114.874	477.542	316.839	193.667
34	Kota Mojokerto	397.094	103.431	55.437	152.462	172.373	303.737
35	Kota Pasuruan	432.090	92.197	51.513	147.819	99.752	172.509
36	Kota Probolinggo	470.213	83.332	59.829	171.307	297.038	147.706
37	Kota Surabaya	1.233.380	294.850	412.789	4.090.207	1.414.930	1.789.394
38	Kota Batu	480.460	93.064	51.317	109.533	91.492	174.369

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Data yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.8 terlihat bahwa DAU terbesar sejumlah 1.709.893 pada Kab. Jember dan DAU terkecil sejumlah 397.094 pada Kota Mojokerto. Selanjutnya DAK terbesar sejumlah 477.440 pada Kab. Tulungagung, sedangkan DAK terkecil sejumlah 83.332 pada Kota Probolinggo. Untuk nilai DBH terbesar sejumlah 909.808 pada Kab. Bojonegoro dan DBH terkecil sejumlah 51.317 pada Kota Batu. Kemudian untuk PAD terbesar sejumlah 4.090.207 pada Kota Surabaya, sebaliknya PAD terendah sejumlah 109.533 pada Kota Batu. Lalu

SiLPA terbesar sejumlah 1.414.930 pada Kota Surabaya dan SiLPA terkecil sejumlah 91.492 pada Kota Batu. Dan untuk Belanja Modal terbesar sejumlah 1.789.394 pada Kota Surabaya, sebaliknya Belanja Modal terkecil sejumlah 147.706 pada Kota Probolinggo.

Tabel 4.9
Laporan Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Belanja Modal Provinsi Jawa Timur tahun 2017
(Dalam Milyar Rupiah)

No.	Kota/Kabupaten	DAU	DAK	DBH	PAD	SiLPA	Belanja Modal
1	Kab. Bangkalan	994.461	380.891	77.128	325.526	59.468	296.055
2	Kab. Banyuwangi	1.375.784	344.860	73.021	388.944	82.073	657.077
3	Kab. Blitar	1.108.687	373.933	61.005	322.879	137.609	593.444
4	Kab. Bojonegoro	932.445	178.879	776.576	448.188	79.052	573.457
5	Kab. Bondowoso	910.319	334.572	66.181	229.151	120.782	383.574
6	Kab. Gresik	907.247	261.439	156.045	871.564	67.862	422.642
7	Kab. Jember	1.688.226	497.214	123.790	719.214	649.556	708.871
8	Kab. Jombang	1.091.779	322.286	71.976	521.237	228.373	387.323
9	Kab. Kediri	1.220.409	372.796	90.233	533.985	473.606	675.279
10	Kab. Lamongan	1.146.161	208.765	75.481	429.200	70.312	505.222
11	Kab. Lumajang	972.853	284.611	60.462	324.254	185.336	258.258
12	Kab. Madiun	877.869	249.789	53.219	241.944	120.465	374.317
13	Kab. Magetan	899.960	287.738	56.122	212.806	46.948	201.216
14	Kab. Malang	1.665.111	506.689	128.180	743.313	217.445	740.344
15	Kab. Mojokerto	973.769	309.980	59.870	500.518	290.475	576.646
16	Kab. Nganjuk	1.059.746	380.659	63.118	332.496	233.495	319.990
17	Kab. Ngawi	1.039.619	302.818	65.798	275.721	266.102	379.215
18	Kab. Pacitan	793.715	234.751	52.714	202.091	28.306	346.602
19	Kab. Pamekasan	847.777	402.205	87.441	243.312	198.319	372.031
20	Kab. Pasuruan	1.179.521	373.333	244.687	759.946	180.499	492.094
21	Kab. Ponorogo	1.043.917	325.092	64.067	308.232	70.616	465.256
22	Kab. Probolinggo	961.711	295.277	88.473	302.046	141.952	326.770
23	Kab. Sampang	818.929	230.240	55.059	209.545	157.277	374.876
24	Kab. Sidoarjo	1.203.737	385.370	119.779	1.671.807	583.992	565.234
25	Kab. Situbondo	806.661	214.028	70.312	228.524	110.931	345.382
26	Kab. Sumenep	1.099.838	309.860	95.954	190.750	289.411	291.885

No.	Kota/Kabupaten	DAU	DAK	DBH	PAD	SiLPA	Belanja Modal
27	Kab. Trenggalek	885.545	251.867	57.298	253.225	153.545	352.599
28	Kab. Tuban	1.028.370	290.413	99.461	497.224	264.647	497.409
29	Kab. Tulungagung	1.151.960	376.014	66.136	503.103	209.097	395.843
30	Kota Blitar	421.212	91.001	50.366	194.765	63.716	174.990
31	Kota Kediri	606.928	123.668	108.715	293.065	230.907	243.196
32	Kota Madiun	502.392	77.267	59.314	230.609	305.857	255.978
33	Kota Malang	844.576	216.459	113.685	588.277	305.006	340.494
34	Kota Mojokerto	390.119	78.772	50.451	178.295	31.115	121.145
35	Kota Pasuruan	424.500	70.450	45.396	147.981	106.672	220.001
36	Kota Probolinggo	461.953	109.326	53.402	203.938	270.383	239.181
37	Kota Surabaya	1.211.714	378.499	375.423	5.161.845	1.068.141	2.517.892
38	Kota Batu	474.780	71.395	43.446	149.424	72.309	142.583

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Data yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.9 terlihat bahwa DAU terbesar sejumlah 1.688.226 pada Kab. Jember dan DAU terkecil sejumlah 390.119 pada Kota Mojokerto. Selanjutnya DAK terbesar sejumlah 506.689 pada Kab. Malang, sedangkan DAK terkecil sejumlah 70.450 pada Kota Pasuruan. Untuk nilai DBH terbesar sejumlah 776.576 pada Kab. Bojonegoro dan DBH terkecil sejumlah 43.446 pada Kota Batu. Kemudian untuk PAD terbesar sejumlah 5.161.845 pada Kota Surabaya, sebaliknya PAD terendah sejumlah 147.981 pada Kota Pasuruan. Lalu SiLPA terbesar sejumlah 1.068.141 pada Kota Surabaya dan SiLPA terkecil sejumlah 28.306 pada Kab. Pacitan. Dan untuk Belanja Modal terbesar sejumlah 2.517.892 pada Kota Surabaya, sebaliknya Belanja Modal terkecil sejumlah 121.145 pada Kota Mojokerto.

Tabel 4.10
Laporan Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Belanja Modal Provinsi Jawa Timur tahun 2018
(Dalam Milyar Rupiah)

No.	Kota/Kabupaten	DAU	DAK	DBH	PAD	SiLPA	Belanja Modal
1	Kab. Bangkalan	968.770	260.697	115.358	199.258	59.468	324.706
2	Kab. Banyuwangi	1.375.784	423.718	161.490	450.067	82.073	480.383
3	Kab. Blitar	1.109.813	382.043	107.643	252.453	137.609	409.774
4	Kab. Bojonegoro	932.358	349.495	2.532.808	425.168	79.052	601.338
5	Kab. Bondowoso	910.319	309.057	116.664	203.239	120.782	284.801
6	Kab. Gresik	909.888	330.283	184.997	957.256	67.862	369.883
7	Kab. Jember	1.697.477	478.355	171.576	597.509	649.556	532.248
8	Kab. Jombang	1.091.779	341.135	126.344	438.197	228.373	293.716
9	Kab. Kediri	1.225.332	406.577	137.140	476.905	473.606	547.124
10	Kab. Lamongan	1.146.161	429.800	124.753	436.595	70.312	531.811
11	Kab. Lumajang	972.853	306.662	111.199	270.170	185.336	288.428
12	Kab. Madiun	877.862	303.838	104.647	219.041	120.465	291.642
13	Kab. Magetan	899.960	278.741	101.433	196.826	46.948	194.944
14	Kab. Malang	1.665.196	553.022	194.849	585.291	217.445	718.439
15	Kab. Mojokerto	973.769	337.920	115.579	546.289	290.475	554.144
16	Kab. Nganjuk	1.059.437	361.602	108.524	361.587	233.495	339.784
17	Kab. Ngawi	1.039.619	334.580	111.935	223.872	266.102	307.437
18	Kab. Pacitan	793.715	277.683	99.007	185.153	28.306	271.920
19	Kab. Pamekasan	849.764	266.901	135.741	222.411	198.319	317.341
20	Kab. Pasuruan	1.179.778	387.074	291.469	614.303	180.499	447.988
21	Kab. Ponorogo	1.038.914	405.687	107.415	289.018	70.616	403.303
22	Kab. Probolinggo	967.345	282.727	145.692	234.484	141.952	242.838
23	Kab. Sampang	825.443	279.475	107.198	135.350	157.277	312.563
24	Kab. Sidoarjo	1.191.857	415.806	185.812	1.685.559	583.992	810.565
25	Kab. Situbondo	806.661	303.035	118.074	187.287	110.931	398.444
26	Kab. Sumenep	1.144.490	318.164	138.648	185.833	289.411	353.712
27	Kab. Trenggalek	885.545	290.489	101.859	233.809	153.545	311.421
28	Kab. Tuban	1.027.874	311.052	154.291	442.532	264.647	494.964
29	Kab. Tulungagung	1.151.960	438.492	111.227	453.153	209.097	370.662
30	Kota Blitar	421.212	104.546	100.776	163.026	63.716	160.034
31	Kota Kediri	606.559	111.321	162.364	249.093	230.907	133.226
32	Kota Madiun	501.753	70.690	105.974	230.848	305.857	259.088
33	Kota Malang	844.477	184.452	152.360	556.888	305.006	351.203

No.	Kota/Kabupaten	DAU	DAK	DBH	PAD	SiLPA	Belanja Modal
34	Kota Mojokerto	378.916	74.275	99.934	182.508	31.115	119.434
35	Kota Pasuruan	424.500	124.354	101.134	153.027	106.672	184.267
36	Kota Probolinggo	461.403	102.056	103.360	175.790	270.383	162.787
37	Kota Surabaya	1.211.714	398.797	478.359	4.972.891	1.068.141	2.430.061
38	Kota Batu	474.881	77.839	96.524	162.575	72.309	125.401

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Data yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.10 terlihat bahwa DAU terbesar sejumlah 1.697.477 pada Kab. Jember dan DAU terkecil sejumlah 378.916 pada Kota Mojokerto. Selanjutnya DAK terbesar sejumlah 553.022 pada Kab. Malang, sedangkan DAK terkecil sejumlah 70.690 pada Kota Madiun. Untuk nilai DBH terbesar sejumlah 2.532.808 pada Kab. Bojonegoro dan DBH terkecil sejumlah 96.524 pada Kota Batu. Kemudian untuk PAD terbesar sejumlah 4.972.891 pada Kota Surabaya, sebaliknya PAD terendah sejumlah 135.350 pada Kab. Sampang. Lali SiLPA terbesar sejumlah 1.068.141 pada Kota Surabaya dan SiLPA terkecil sejumlah 28.306 pada Kab. Pacitan. Dan untuk Belanja Modal terbesar sejumlah 2.430.061 pada Kota Surabaya, sebaliknya Belanja Modal terkecil sejumlah 119.434 pada Kota Mojokerto.

4.3 Analisis Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis

4.3.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum dan lainnya. Hasil pengujian statistik deskriptif untuk variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran dan Belanja Modal tahun 2016-2018 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.11
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	114	26.66	28.17	27.5251	.36091
X2	114	24.98	27.04	26.2474	.53396
X3	114	24.49	28.56	25.3635	.62200
X4	114	25.42	29.27	26.4961	.70872
X5	114	24.07	27.98	25.9541	.77373
Y	114	25.51	28.55	26.6637	.54385
Valid N (listwise)	114				

Sumber : Output IBM SPSS Statistics 24.0, data yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah data (N) yang diuji sebanyak 114 dan diperoleh gambaran nilai dari variabel independen dan dependen dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Variabel Dana Alokasi Umum (X_1) memiliki nilai 26.66 atau sama dengan Rp 378.916.109.000 yang diperoleh Kota Mojokerto pada tahun 2018 dan nilai maksimum 28.17 atau sama dengan Rp 1.709.892.845.000 yang diperoleh Kab. Jember pada tahun 2016. Nilai *mean* sebesar 27.5251 atau sama dengan Rp 953.601.623.600 dan standar deviasi sebesar 0.36091 atau sama dengan Rp 304.113.061.700.
- 2) Variabel Dana Alokasi Khusus (X_2) memiliki nilai minimum 24.98 atau sama dengan Rp 70.449.544.490 yang diperoleh Kota Pasuruan pada tahun 2017 dan nilai maksimum 27.04 atau sama dengan Rp 553.022.487.200 yang diperoleh Kab. Malang pada tahun 2018. Nilai *mean* sebesar 26.2474

atau sama dengan Rp 281.433.504.000 dan standar deviasi sebesar 0.53396 atau sama dengan Rp 114.729.250.500.

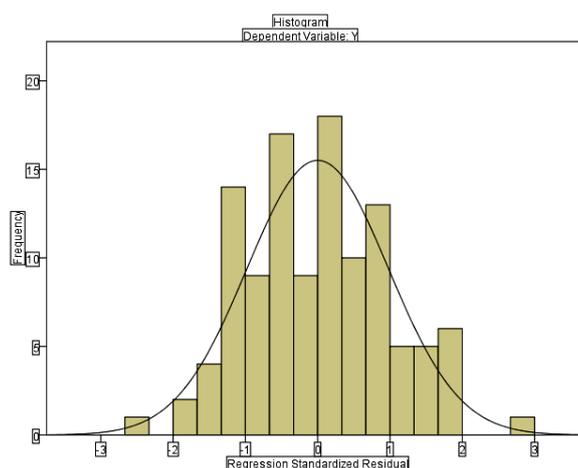
- 3) Variabel Dana Bagi Hasil (X_3) memiliki nilai minimum 24.49 atau sama dengan Rp 43.445.796.140 yang diperoleh Kota Batu pada tahun 2017 dan nilai maksimum 28.56 atau sama dengan Rp 2.532.807.898.000 yang diperoleh Kab. Bojonegoro tahun 2018. Nilai *mean* sebesar 25.3635 atau sama dengan Rp 144.070.649.000 dan standar deviasi sebesar 0.62200 atau sama dengan Rp 255.016.349.800.
- 4) Variabel Pendapatan Asli Daerah (X_4) memiliki nilai minimum 25.42 atau sama dengan Rp 109.533.498.000 yang diperoleh Kota Batu pada tahun 2016 dan nilai maksimum 29.27 atau sama dengan Rp 5.161.844.571.000 yang diperoleh Kota Surabaya pada tahun 2017. Nilai *mean* sebesar 26.4961 atau sama dengan Rp 472.869.173.800 dan standar deviasi sebesar 0.70872 atau sama dengan Rp 756.329.636.600.
- 5) Variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X_5) memiliki nilai minimum 24.07 atau sama dengan Rp 28.306.481.620 yang diperoleh Kab. Pacitan pada tahun 2016 dan nilai maksimum 27.98 atau sama dengan Rp 1.414.929.807.000 yang diperoleh Kota Surabaya tahun 2016. Nilai *mean* sebesar 25.9541 atau sama dengan Rp 248.193.236.800 dan standar deviasi sebesar 0.77373 atau sama dengan Rp 210.820.584.900.
- 6) Variabel Belanja Modal (Y) memiliki nilai minimum 25.51 atau sama dengan Rp 119.434.272.400 yang diperoleh Kota Mojokerto tahun 2018 dan nilai maksimum 28.55 atau sama dengan Rp 2.517.891.658.000 yang

diperoleh Kota Surabaya tahun 2017. Nilai *mean* sebesar 26.6637 atau sama dengan Rp 449.622.532.500 dan standar deviasi sebesar 0.54385 atau sama dengan Rp 349.395.682.000.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak. Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada grafik histogram berikut :



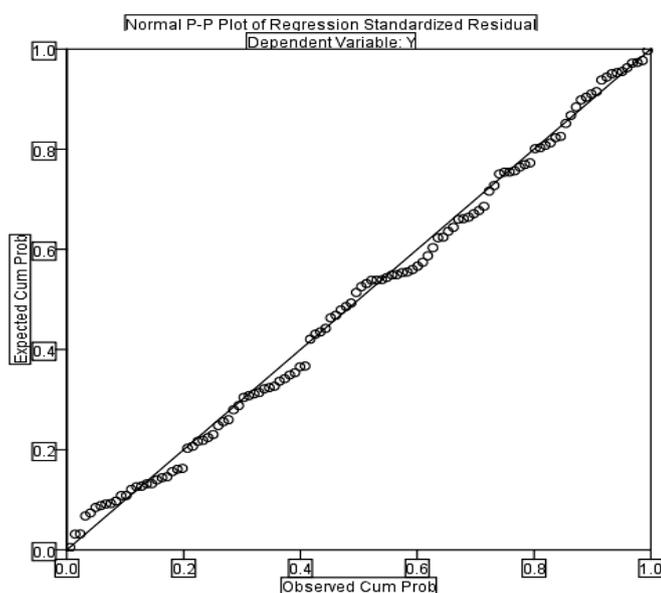
Sumber : Output IBM SPSS Statistics 24.0, data yang diolah, 2020

Gambar 4.3
Grafik Histogram Normalitas

Berdasarkan Gambar 4.3 menunjukkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang tidak menceng (*skewness*) ke kiri maupun ke kanan sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Namun demikian hanya melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil.

Metode lain yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi

akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2018:161). Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada grafik *normal probability plot* berikut :



Sumber : Output IBM SPSS Statistics 24.0, data yang diolah, 2020

Gambar 4.4
Uji Normalitas dengan *probability plot*

Berdasarkan Gambar 4.4 menunjukkan bahwa grafik *normal probability plot* terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Pengujian normalitas residual juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-smirnov* (Ghozali, 2018:165-167). Pada uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-smirnov*, data dikatakan berdistribusi

normal jika koefisien *asyp.Sig (2 tailed)* lebih besar dari 0.05 (a-5%). Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.12
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.27790668
Most Extreme Differences	Absolute	.048
	Positive	.048
	Negative	-.037
Test Statistic		.048
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Output IBM SPSS Statistics 24.0, data yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil pengujian normalitas menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-smirnov* pada tabel 4.12 diketahui nilai koefisien *asyp.Sig (2 tailed)* adalah 0.200 hal tersebut menunjukkan nilai signifikan lebih besar dari 0.05 atau $0.200 > 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.3.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi yaitu dapat

dilihat dari (1) nilai *Tolerance* dan lawannya (2) *Variance Inflation Factor* (VIF) (Ghozali, 2018:107). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinier adalah nilai *Tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 . Tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen apabila nilai *Tolerance Value* ≥ 0.10 atau nilai VIF ≤ 10 (Ghozali, 2018:108). Hasil uji multikolinieritas data dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.13
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	.140	7.165
X2	.169	5.910
X3	.667	1.500
X4	.458	2.185
X5	.680	1.471

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Output IBM SPSS Statistics 24.0, data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.13 diketahui bahwa variabel bebas yaitu Dana Alokasi Umum (X1), Dana Alokasi Khusus (X2), Dana Bagi Hasil (X3), Pendapatan Asli Daerah (X4) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X5) memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi ini.

4.3.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Salah satu cara untuk mendeteksi ada

atau tidanya autokorelasi yaitu dengan *uji durbin watson (DW test)*. Tidak terjadi autokorelasi apabila nilai $du < d < 4-du$. Hasil uji autokorelasi data dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.14
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.860 ^a	.739	.727	.28427	1.899

a. Predictors: (Constant), X5, X3, X2, X4, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Output IBM SPSS Statistics 24.0, data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.14 diketahui bahwa nilai Durbin Watson test adalah 1.899 dengan jumlah pengamatan (n) sebanyak 114 dan jumlah variabel bebas 5 (k=5), maka berdasarkan tabel Durbin Watson (DW) di dapat nilai batas bawah (dL) dan nilai batas atas (dU) diketahui 1.6042 dan 1.7869, dapat dilihat bahwa nilai DW lebih besar dari 1.7869 dan lebih kecil dari $4 - 1.7869$ atau dapat dinyatakan bahwa $1.7869 < 1.899 < 4 - 1.7869$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi ini.

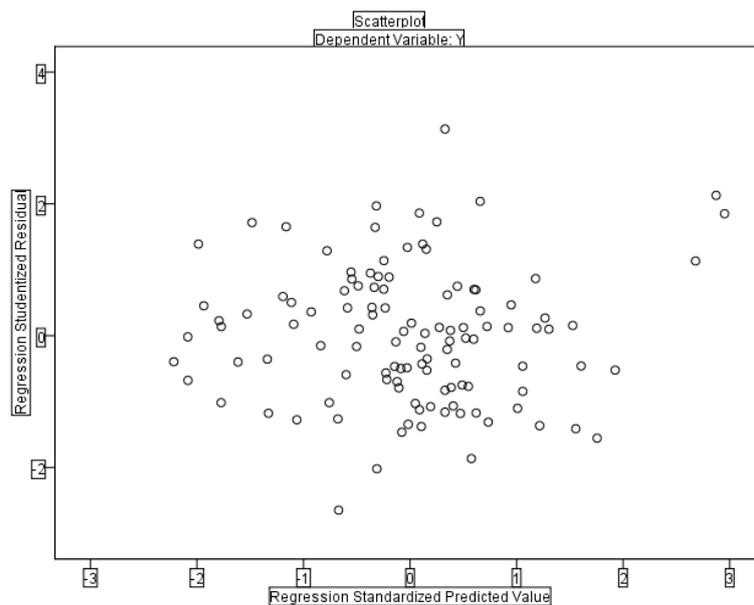
4.3.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y

sesungguhnya) yang telah di-*studentized* (Ghozali, 2018:144). Dasar analisisnya yaitu :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat dari gambar berikut :



Sumber : Output IBM SPSS Statistics 24.0, data yang diolah, 2020

Gambar 4.5
Uji Heteroskedastisitas dengan *Scatterplot*

Berdasarkan gambar 4.5 diketahui bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

4.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.15
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.044	2.458		-.018	.986
	X1	.122	.198	.081	.617	.538
	X2	.351	.122	.345	2.883	.005
	X3	.117	.053	.134	2.228	.028
	X4	.263	.056	.343	4.716	.000
	X5	.161	.042	.229	3.842	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Output IBM SPSS Statistics 24.0, data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = -0.044 + 0.122X_1 + 0.351X_2 + 0.117X_3 + 0.263X_4 + 0.161X_5 + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Modal

X₁ = Dana Alokasi Umum

X₂ = Dana Alokasi Khusus

X₃ = Dana Bagi Hasil

X₄ = Pendapatan Asli Daerah

X₅ = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

e = Error

Dari persamaan regresi diatas dapat diketahui :

- 1) Konstanta sebesar -0.044 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan ($X_1=0, X_2=0, X_3=0, X_4=0, X_5=0$), maka rata-rata Belanja Modal berkurang sebesar 0.044 atau -4.4%.
- 2) Koefisien regresi Dana Alokasi Umum (X_1) sebesar 0.122 menyatakan bahwa setiap penambahan Dana Alokasi Umum sebesar 1% akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0.122 atau 12.2%.
- 3) Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus (X_2) sebesar 0.351 menyatakan bahwa setiap penambahan Dana Alokasi Khusus sebesar 1% akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0.351 atau 35.1%.
- 4) Koefisien regresi Dana Bagi Hasil (X_3) sebesar 0.117 menyatakan bahwa setiap penambahan Dana Bagi Hasil sebesar 1% akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0.117 atau 11.7%.
- 5) Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (X_4) sebesar 0.263 menyatakan bahwa setiap penambahan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1% akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0.263 atau 26.3%.
- 6) Koefisien regresi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X_5) sebesar 0.161 menyatakan bahwa setiap penambahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar 1% akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0.161 atau 16.1%

4.3.4 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai statistik t dan menggunakan signifikansi level 0.05 ($\alpha = 5\%$). Dasar pengambilan keputusan dalam uji t dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< \alpha = 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $> \alpha = 0.05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Rumus untuk mencari nilai t tabel, yakni :

$$\begin{aligned} t_{tabel} &= (\alpha/2 ; n - k) \\ &= (0.05/2 ; 114 - 5) \\ &= (0.025 ; 109) \end{aligned}$$

Maka diperoleh nilai t tabel = 1.98197

Adapun hasil dari uji statistik t dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.16
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.044	2.458		-.018	.986
X1	.122	.198	.081	.617	.538
X2	.351	.122	.345	2.883	.005
X3	.117	.053	.134	2.228	.028
X4	.263	.056	.343	4.716	.000
X5	.161	.042	.229	3.842	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Output IBM SPSS Statistics 24.0, data yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.16 diperoleh hasil statistik uji t dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut :

1) Pengujian Variabel Dana Alokasi Umum (X₁) terhadap Belanja Modal

Hipotesis yang diajukan yaitu :

Ho = Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Ha = Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dari tabel 4.16 dapat diketahui bahwa nilai t hitung yakni $0.617 < t$ tabel 1.98197 dan nilai signifikansi $0.538 > 0.05$ maka berdasarkan hipotesis yang diajukan dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2) Pengujian Variabel Dana Alokasi Khusus (X_2) terhadap Belanja Modal.

Hipotesis yang diajukan yaitu :

H_0 = Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H_a = Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dari tabel 4.16 dapat diketahui bahwa nilai t hitung yakni $2.883 > t$ tabel 1.98197 dan nilai signifikansi $0.005 < 0.05$ maka berdasarkan hipotesis yang diajukan dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

3) Pengujian Variabel Dana Bagi Hasil (X_3) terhadap Belanja Modal.

Hipotesis yang diajukan yaitu :

H_0 = Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H_a = Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dari tabel 4.16 dapat diketahui bahwa nilai t hitung yakni $2.228 > t$ tabel 1.98197 dan nilai signifikansi $0.028 < 0.05$ maka berdasarkan hipotesis yang diajukan dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal.

4) Pengujian Variabel Pendapatan Asli Daerah (X_4) terhadap Belanja Modal.

Hipotesis yang diajukan yaitu :

H_0 = Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H_a = Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dari tabel 4.16 dapat diketahui bahwa nilai t hitung yakni $4.716 > t$ tabel 1.98197 dan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ maka berdasarkan hipotesis yang diajukan dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

5) Pengujian Variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X_5) terhadap Belanja Modal.

Hipotesis yang diajukan yaitu :

H_0 = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H_a = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dari tabel 4.16 dapat diketahui bahwa nilai t hitung yakni $3.842 > t$ tabel 1.98197 dan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ maka berdasarkan hipotesis yang diajukan dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Hipotesis pertama menyatakan bahwa “Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal”. Selanjutnya hasil penelitian menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh pada Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pemerintah

daerah di Provinsi Jawa Timur, hal tersebut ditunjukkan dari hasil uji statistik t, dengan nilai statistik t hitung sebesar 0.617, nilai ini lebih kecil dari t tabel yaitu 1.98197 dan didukung pula oleh nilai signifikansi 0.538 lebih besar dari 0.05, berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa H_1 ditolak yang berarti Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian dapat diartikan bahwa daerah yang memperoleh Dana Alokasi Umum tinggi, cenderung memiliki Belanja Modal yang rendah dan sebaliknya, hal tersebut dimungkinkan karena Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersifat "*Block Grant*" yang artinya Pemerintah Daerah bebas dalam menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerahnya. Salah satu faktor yang diperhatikan dalam perhitungan Dana Alokasi Umum adalah Alokasi Dasar yang berupa Gaji PNS Daerah hal tersebut menyebabkan sebagian besar Dana Alokasi Umum digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja pegawainya dan bukan berfokus pada kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Fahlevi (2016) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal, namun hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk (2017), Palupi dan Sulardi (2018), Ayem dan Pratama (2018) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

4.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Hipotesis kedua menyatakan bahwa “Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal”. Selanjutnya hasil penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur, hal tersebut ditunjukkan dari hasil uji statistik t, dengan nilai statistik t hitung sebesar 2.883, nilai ini lebih besar dari t tabel yaitu 1.98197 dan didukung pula oleh nilai signifikansi 0.005 lebih kecil dari 0.05, berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa H_2 diterima yang berarti Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian dapat diartikan bahwa daerah yang memperoleh Dana Alokasi Khusus tinggi maka semakin tinggi pula Belanja Modal daerah tersebut, hal ini sesuai dengan tujuan pengalokasian Dana Alokasi Khusus yaitu untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional seperti pada bidang pendidikan, kesehatan (pelayanan dasar dan pelayanan rujukan), jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan prasarana perdesaan, serta perdagangan. Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik, hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pendanaan untuk membiayai Belanja Modal.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Palupi dan Sulardi (2018) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

4.4.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa “Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal”. Selanjutnya hasil penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh pada Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur, hal tersebut ditunjukkan dari hasil uji statistik t, dengan nilai statistik t hitung sebesar 2.228, nilai ini lebih besar dari t tabel yaitu 1.98197 dan didukung pula oleh nilai signifikansi 0.028 lebih kecil dari 0.05, berdasarkan dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa H_3 diterima yang berarti Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian dapat diartikan bahwa daerah yang memperoleh Dana Bagi Hasil tinggi maka semakin tinggi pula Belanja Modal daerah tersebut. Tujuan Dana Bagi Hasil yaitu untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Pembagian Dana Bagi Hasil dilakukan berdasarkan prinsip daerah asal (*by origin*), sebagian penerimaan yang diperoleh dari daerah penghasil harus diberikan dan dinikmati oleh daerah penghasil yang bersangkutan. Salah satu sumber penerimaan Dana Bagi Hasil berasal dari pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh

Pasal 21. Dalam teori keagenan masyarakat sebagai *principal* telah memenuhi kewajibannya dengan membayar retribusi, pajak dan sebagainya untuk menambah pendapatan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah sebagai *agent* memiliki kewajiban untuk memberikan timbal balik dengan meningkatkan pelayanan dan fasilitas publik kepada masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendanaan untuk membiayai Belanja Modal.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Fahlevi (2016) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal.

4.4.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Hipotesis keempat menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal”. Berdasarkan Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh pada Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur, hal tersebut ditunjukkan dari hasil uji statistik t, dengan nilai statistik t hitung sebesar 4.716, nilai ini lebih besar dari t tabel yaitu 1.98197 dan didukung pula oleh nilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05, berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa H_4 diterima yang berarti Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian dapat diartikan bahwa daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah tinggi maka semakin tinggi pula Belanja Modal daerah tersebut, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan daerah yang berasal dari potensi wilayahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah meliputi hasil

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pemerintah daerah dituntut mampu memaksimalkan potensi daerah dan menggali Pendapatan Asli Daerah sebesar-besarnya. Besarnya Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki daerah dapat menjadi indikator kemandirian daerah yang berarti semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki daerah maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk membiayai segala urusan pemerintahannya termasuk pemenuhan kebutuhan Belanja Modal seperti pembangunan sarana dan prasarana daerah. hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendanaan untuk membiayai Belanja Modal.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Fahlevi (2016), Sari dkk (2017) dan juga Khairul Ifa (2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

4.4.5 Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal

Hipotesis kelima menyatakan bahwa “Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal”. Berdasarkan Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur, hal tersebut ditunjukkan dari hasil uji statistik t, dengan nilai statistik t hitung sebesar 3.842, nilai ini lebih besar dari t tabel yaitu 1.98197 dan didukung pula oleh nilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05, Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa H_5 diterima yang berarti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian dapat diartikan bahwa daerah yang memiliki SiLPA tinggi maka semakin tinggi pula Belanja Modal daerah tersebut, SiLPA hanya terbentuk bila terjadi surplus dalam APBD dan terjadi Pembiayaan Neto yang positif dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan, SiLPA akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja serta mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran juga merupakan sumber pendanaan untuk membiayai Belanja Modal.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk (2017), Khairul Ifa (2017), Palupi dan Sulardi (2018) yang menyatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur, hal tersebut dimungkinkan karena Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersifat “*Block Grant*” yang artinya Pemerintah Daerah bebas dalam menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerahnya serta salah satu faktor yang diperhatikan dalam perhitungan Dana Alokasi Umum adalah Alokasi Dasar yang berupa Gaji PNS Daerah hal tersebut menyebabkan sebagian besar Dana Alokasi Umum digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja pegawainya.
2. Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur, hal ini sesuai dengan tujuan pengalokasian Dana Alokasi Khusus yaitu untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional.
3. Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur, hal ini sesuai dengan Tujuan Dana Bagi Hasil

yaitu untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil serta dalam teori keagenan masyarakat sebagai *principal* telah memenuhi kewajibannya dengan membayar retribusi, pajak dan sebagainya untuk menambah pendapatan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah sebagai *agent* memiliki kewajiban untuk memberikan timbal balik dengan meningkatkan pelayanan dan fasilitas publik kepada masyarakat.

4. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur, hal tersebut karena Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan daerah yang berasal dari potensi wilayahnya sendiri. Besarnya Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki daerah dapat menjadi indikator kemandirian daerah yang berarti semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki daerah maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk membiayai segala urusan pemerintahannya termasuk pemenuhan kebutuhan Belanja Modal.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur, hal tersebut karena SiLPA akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja serta mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas jangkauan sampel penelitian dengan periode pengamatan yang lebih dari tiga tahun serta menambah variabel independen lain yang mempengaruhi belanja modal baik dari sektor keuangan maupun non keuangan.
2. Bagi Pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur diharapkan lebih mampu melakukan efisiensi Dana Alokasi Umum terhadap program non-prioritas untuk dialokasikan lebih ke Belanja Modal, serta mampu meningkatkan potensi penerimaan daerahnya terutama dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah agar mengurangi ketergantungan daerah dari Dana Perimbangan.
3. Bagi Masyarakat diharapkan turut serta membantu pemerintah dalam menggali potensi penerimaan daerahnya serta masyarakat selaku pengawas jalannya pemerintahan agar dapat memberikan kritik dan saran yang membangun sehingga kinerja pemerintah menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, Nanda Yoga, dan Novi Dirgantari 2017, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015, *KOMPARTEMEN Jurnal Ilmiah Akuntansi*, vol. XV, no.1, PP. 42-56.
- Aryani, Putri Retno 2017, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Palembang.
- Astuti, Novita Dwi 2017, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2014, Skripsi, Universitas Negeri, Yogyakarta.
- Ayem, Sri, dan Dessy Dyah Pratama 2018, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016, *Akuntansi Dewantara*, vol. 2, no. 2, pp. 169-182.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2020, Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, Jawa Timur *Province In Figures 2020*, Katalog, PT. Sinar Murni Indo Printing, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Retrived February 16, 2020. from <https://jatim.bps.go.id/subject/101/pemerintahan.html#subjekViewTab3>
- Fadillah R, Rifka Aulia Nur 2018, Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2015 - 2016), Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Farel, Rully 2015, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Bogor, *Signifikan Jurnal Ilmu Ekonomi*, vol. 4, no. 2, pp. 189-210.
- Fitriana, Nihayatul, Dan Sudarti Sudarti 2018, Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, vol. 2, no. 2, pp. 332 – 345.

- Ghozali, Imam 2018, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25, Edisi Kesembilan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul 2014, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul, dan Muhammad Syam Kusufi 2014, Akuntansi Sektor Publik, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta.
- Hermawan, Achmad David, Anwar Made, dan Doni Wirshandono Yogivaria 2016, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Se-Malang Raya), JRMA : Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, vol. 4 no. 2, pp. 1-11.
- Ifa, Khoirul 2017, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Dan Kota di Provinsi Jawa Timur, Jurnal GLOBAL, vol. 02, no. 01, pp. 15-25.
- Intani, Rachmi 2018, Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016, Skripsi, Universitas Negeri, Yogyakarta.
- Jannah, Roihatul, Budi Wahono, dan M. Agus Salim 2017, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus Pemerintahan Kabupaten Gresik Periode 2009–2015), Warta Ekonomi, vol. 07, no. 17, pp. 123-131.
- Karyadi, Santika Adhi 2017, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011–2014, Skripsi, Universitas Negeri, Yogyakarta.
- Kasdy, Laila Murhani, Nadirsyah, Dan Heru Fahlevi 2018, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, vol. 4, no. 1, pp. 1-18.
- Kementrian Hukum dan HAM RI, Retrived April 21, 2020 from <http://peraturan.go.id/>

- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Retrived February 16, from www.djpk.depkeu.go.id
- Kurniati, Putri Tri 2017, Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Periode Tahun 2010-2014), Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Kusumawardani, Ismawulan 2018, Pengaruh PAD, DAU, DAK, SiLPA dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2010-2015, Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, Retrived February 29, 2020 from http://jatimprov.go.id/ppid/uploads/berkasppid/Laporan%20Kinerja%202017_Provinsi%20Jawa%20%20Timur.pdf
- Lubis, Hanisya Ursilla 2019, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan), Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Mahargono, Imaniar Putri 2017, Pengaruh PAD, DAU, DAK dan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal di Jawa Timur, Artikel Ilmiah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Surabaya.
- Mandani, Putri Suci Tri 2019, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Wilayah Jawa Timur (Perspektif Ekonomi Islam), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Tulungagung.
- Mardiasmo, 2018, Akuntansi Sektor Publik, Edisi Terbaru, ANDI, Yogyakarta.
- Nopitasari, Erlinda Dwi 2017, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013-2015), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Surakarta.
- Nurjanah, Desy 2017, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Derajat Desentralisasi dan Ketergantungan Keuangan Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Wilayah Jawa Tengah Tahun 2013-2015), Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

- Palupi, Filma Ayu Dian, dan Sulardi 2018, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perubahan Alokasi Belanja Modal, *Jurnal Akuntansi*, vol. 6, no. 1, pp. 40-51.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Putri, Kuntami Suryani 2016, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Prasetya, Ikhwan 2017, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Pegawai Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia), *Jurnal Akuntansi*, vol. 5, no. 2, pp. 1-20.
- Rahayu, Resti 2019, Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Alokasi Belanja Modal di Provinsi Sumatera Barat, *JIET : Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, vol. 4, no. 2, pp. 1-25.
- Rohini, Suci 2019, Pengaruh Luas Wilayah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Y Periode 2015-2017), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Surakarta.
- Sari, Desak Gede Yudi Atika, Putu Kepramareni, dan Ni Luh Gde Novitasari 2017, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Dana Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali, *Jurnal KRISNA : Kumpulan Riset Akuntansi*, vol. 9, no. 1, pp. 15-29.
- Sari, Novita 2018, Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008-2016 Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.
- Sari, Pertamaya 2017, Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana

Alokasi Khusus Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Palembang.

Siregar, Baldric 2015, Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Sekolah Tinggi Umu Manajemen YKPN, Yogyakarta.

Siregar, Endang Maya Lestari 2019, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Padang Lawas Utara, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Sugiyanta, 2016, Analisis Belanja Modal Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia, Jurnal Akuntansi Universitas Jember, vol. 14, no. 1, pp. 19-40.

Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Pendidikan :Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta.

_____, 2016, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Cetakan Delapan, Alfabeta, Bandung.

_____, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cetakan ke-25, Alfabeta, Bandung.

Suryana, 2018, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal, Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis, vol. 9, no. 2, pp. 67-74.

Susanti, Susi, dan Heru Fahlevi 2016, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka), vol. 1, no. 1, pp. 183-191.

Talluta, Dessyana Lourine, Rossy Lambelanova, dan Ella Wargadinata 2018, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan SiLPA Terhadap Belanja Modal dan Dampaknya Kepada Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, vol. 8, no. 1, pp. 43-66.

Tandiontong, Mathius 2016, Kualitas Audit dan Pengukurannya, Alfabeta, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

_____, Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

_____, Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

Wibisono, Nurharibnu, dan Arini Wildaniati 2016, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, SiLPA dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal, EKOMAKS : Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akutansi, vol. 5, no. 2, pp. 11-20.

Widyawati, Retno 2018, Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Jawa Tengah Periode 2015-2016), Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

Wulandari, Phaureula Artha dan Emy Iryanie 2018, Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta.

Yunita, Aris 2017, Pengaruh Kemandirian Daerah, Tax Effort dan Kepadatan Penduduk Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur, Jurnal Akuntansi AKUNESA, vol. 5, no. 3, pp. 1-19

Zais, Gogor Mustawa Zais 2018, Faktor-faktor yang Memengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan, BALANCE : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, pp. 140-147.

Zulfikar, Alvian 2017, Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB dan NTT Periode 2016), Thesis, Universitas Muhammadiyah, Malang.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Data Penelitian

No.	Kota/Kabupaten	Tahun	DAU	DAK	DBH	PAD	SiLPA	Belanja Modal
1	Kab. Bangkalan	2016	1.012.242.530.000	253.397.903.000	89.023.681.508	200.083.202.454	197.494.091.004	412.823.435.617
2	Kab. Banyuwangi	2016	1.400.384.500.000	357.337.495.217	89.415.397.750	367.872.665.894	371.732.557.493	911.584.332.145
3	Kab. Blitar	2016	1.128.511.321.000	402.370.805.555	68.121.491.880	224.106.765.169	284.511.344.286	692.718.770.257
4	Kab. Bojonegoro	2016	949.118.065.000	135.279.268.459	909.808.298.244	340.407.679.609	333.422.039.568	967.917.005.412
5	Kab. Bondowoso	2016	926.596.442.000	299.830.707.432	71.334.375.370	177.025.949.242	180.837.794.993	425.425.089.820
6	Kab. Gresik	2016	923.469.024.000	263.751.189.347	149.468.790.396	715.480.938.191	117.439.504.844	413.339.658.373
7	Kab. Jember	2016	1.709.892.845.000	430.502.552.000	138.965.088.155	524.137.897.017	437.466.356.061	460.451.300.847
8	Kab. Jombang	2016	1.111.301.450.000	282.844.538.590	85.303.667.270	374.141.185.826	336.445.575.812	364.901.756.772
9	Kab. Kediri	2016	1.242.230.783.000	308.559.509.050	97.026.501.597	339.113.897.822	510.816.430.976	612.052.137.541
10	Kab. Lamongan	2016	1.166.655.654.000	443.757.061.800	98.267.648.141	403.474.462.147	189.685.381.615	616.499.721.973
11	Kab. Lumajang	2016	990.248.409.000	226.586.895.000	69.373.241.624	242.111.541.252	312.815.223.634	347.885.601.308
12	Kab. Madiun	2016	893.565.762.000	332.025.736.458	61.283.188.512	163.635.265.621	253.894.803.240	443.808.272.890
13	Kab. Magetan	2016	916.052.436.000	264.423.446.649	60.433.681.317	165.617.751.404	166.991.262.351	286.943.948.471
14	Kab. Malang	2016	1.694.884.660.000	468.164.701.980	145.219.916.051	502.754.981.975	352.093.880.268	683.932.346.302
15	Kab. Mojokerto	2016	991.180.363.000	243.361.285.520	80.808.790.924	447.620.851.329	381.068.101.211	442.333.406.190
16	Kab. Nganjuk	2016	1.078.695.643.000	282.445.514.114	76.916.649.574	323.045.177.742	343.338.702.213	447.729.508.596
17	Kab. Ngawi	2016	1.058.208.375.000	335.763.929.383	74.196.426.014	195.606.461.847	347.308.631.337	355.374.670.586
18	Kab. Pacitan	2016	807.907.686.000	222.388.548.658	56.876.719.010	150.466.067.821	146.414.491.271	379.166.997.217
19	Kab. Pamekasan	2016	862.935.567.000	346.060.851.131	91.983.362.313	178.478.890.964	253.232.313.866	544.165.819.579
20	Kab. Pasuruan	2016	1.200.611.830.000	356.153.803.649	274.973.151.548	480.758.720.671	543.331.118.167	838.440.054.782

21	Kab. Ponorogo	2016	1.062.582.799.000	325.256.416.313	68.100.582.458	240.111.321.574	171.440.616.059	376.402.638.867
22	Kab. Probolinggo	2016	977.570.137.000	248.073.366.798	95.147.640.501	221.719.364.518	258.206.195.765	289.647.660.708
23	Kab. Sampang	2016	827.952.746.000	328.941.810.494	74.204.892.211	135.785.953.318	228.815.794.504	563.999.688.976
24	Kab. Sidoarjo	2016	1.225.261.302.000	307.378.513.663	157.448.130.456	1.335.283.958.793	574.241.435.046	809.997.501.058
25	Kab. Situbondo	2016	821.084.393.000	276.737.866.782	74.028.875.610	173.836.184.925	191.177.365.877	416.863.544.279
26	Kab. Sumenep	2016	1.110.487.853.000	281.373.415.107	128.057.691.068	208.982.186.961	291.285.969.313	272.014.575.159
27	Kab. Trenggalek	2016	901.379.781.000	250.011.514.267	65.902.375.636	182.174.291.709	233.657.677.225	362.840.294.381
28	Kab. Tuban	2016	1.046.758.509.000	278.716.212.843	118.421.225.440	364.133.296.890	294.018.836.475	464.180.160.121
29	Kab. Tulungagung	2016	1.172.557.802.000	477.440.235.291	76.715.573.584	342.570.756.799	284.804.899.767	574.341.318.491
30	Kota Blitar	2016	428.743.959.000	137.391.098.119	56.541.040.622	131.920.190.721	95.456.361.952	203.371.880.396
31	Kota Kediri	2016	617.780.644.000	98.911.475.000	125.649.030.826	238.318.315.508	535.711.940.752	381.845.509.730
32	Kota Madiun	2016	511.375.289.000	140.847.099.356	65.339.045.850	173.235.929.828	339.135.179.353	246.394.704.721
33	Kota Malang	2016	859.678.208.000	94.813.827.000	114.874.411.979	477.541.556.465	316.838.899.177	193.667.164.391
34	Kota Mojokerto	2016	397.094.498.000	103.431.033.000	55.436.957.047	152.462.202.065	172.373.021.674	303.737.103.331
35	Kota Pasuruan	2016	432.090.225.000	92.196.898.895	51.513.313.785	147.818.815.719	99.751.645.225	172.508.745.500
36	Kota Probolinggo	2016	470.212.966.000	83.332.171.500	59.828.576.539	171.307.335.437	297.037.753.323	147.705.780.026
37	Kota Surabaya	2016	1.233.380.404.000	294.850.212.000	412.788.910.654	4.090.206.769.388	1.414.929.806.905	1.789.394.044.827
38	Kota Batu	2016	480.460.016.000	93.063.615.752	51.317.087.281	109.533.498.034	91.492.226.068	174.368.708.327
39	Kab. Bangkalan	2017	994.460.684.000	380.890.578.020	77.127.718.447	325.525.663.296	59.467.999.707	296.055.032.741
40	Kab. Banyuwangi	2017	1.375.784.247.000	344.859.911.663	73.020.530.894	388.943.532.861	82.072.711.541	657.077.214.260
41	Kab. Blitar	2017	1.108.687.006.000	373.933.107.094	61.005.002.221	322.878.943.149	137.609.170.014	593.444.438.952
42	Kab. Bojonegoro	2017	932.445.113.000	178.879.417.733	776.575.778.925	448.188.138.725	79.051.687.856	573.456.669.154
43	Kab. Bondowoso	2017	910.319.122.000	334.572.066.705	66.180.550.686	229.151.109.431	120.781.616.626	383.574.373.763
44	Kab. Gresik	2017	907.246.643.000	261.439.212.210	156.045.163.060	871.564.498.248	67.862.494.626	422.641.766.003
45	Kab. Jember	2017	1.688.226.251.000	497.213.637.256	123.789.865.394	719.213.581.071	649.555.523.036	708.870.975.184

46	Kab. Jombang	2017	1.091.779.457.000	322.286.044.858	71.975.697.491	521.236.583.750	228.373.317.014	387.322.559.622
47	Kab. Kediri	2017	1.220.408.783.000	372.796.023.204	90.232.919.453	533.985.244.135	473.605.797.114	675.279.276.055
48	Kab. Lamongan	2017	1.146.161.266.000	208.765.331.343	75.480.934.027	429.200.063.877	70.312.355.480	505.221.589.585
49	Kab. Lumajang	2017	972.852.929.000	284.611.017.882	60.461.762.394	324.253.671.099	185.336.398.823	258.258.151.004
50	Kab. Madiun	2017	877.868.685.000	249.788.616.862	53.219.134.475	241.944.162.780	120.464.879.752	374.316.928.090
51	Kab. Magetan	2017	899.960.340.000	287.738.495.074	56.121.666.660	212.806.288.639	46.948.204.448	201.215.680.487
52	Kab. Malang	2017	1.665.110.987.000	506.688.726.785	128.179.963.798	743.313.499.675	217.444.522.923	740.344.342.433
53	Kab. Mojokerto	2017	973.768.511.000	309.980.248.360	59.870.176.023	500.518.075.940	290.474.586.996	576.646.344.208
54	Kab. Nganjuk	2017	1.059.746.429.000	380.659.065.998	63.117.679.922	332.495.541.853	233.495.326.570	319.990.242.921
55	Kab. Ngawi	2017	1.039.619.057.000	302.818.431.695	65.798.320.241	275.721.180.047	266.102.224.965	379.215.035.738
56	Kab. Pacitan	2017	793.715.346.000	234.751.256.308	52.713.507.009	202.090.671.761	28.306.481.622	346.602.302.143
57	Kab. Pamekasan	2017	847.776.564.000	402.204.524.508	87.440.755.214	243.311.843.020	198.319.059.885	372.031.422.732
58	Kab. Pasuruan	2017	1.179.520.941.000	373.333.035.400	244.686.816.268	759.945.807.968	180.498.872.363	492.094.079.745
59	Kab. Ponorogo	2017	1.043.916.636.000	325.092.163.993	64.066.987.767	308.232.104.639	70.616.497.985	465.255.813.619
60	Kab. Probolinggo	2017	961.711.263.000	295.276.579.580	88.473.204.376	302.046.061.276	141.951.799.295	326.769.685.304
61	Kab. Sampang	2017	818.929.326.000	230.240.011.224	55.059.310.923	209.545.224.678	157.276.720.509	374.875.770.149
62	Kab. Sidoarjo	2017	1.203.737.401.000	385.370.458.019	119.779.273.575	1.671.806.819.697	583.992.202.844	565.233.558.275
63	Kab. Situbondo	2017	806.660.581.000	214.027.573.648	70.312.040.008	228.523.663.374	110.931.022.607	345.382.416.018
64	Kab. Sumenep	2017	1.099.838.350.000	309.860.368.380	95.953.589.690	190.750.065.359	289.410.514.391	291.884.664.571
65	Kab. Trenggalek	2017	885.545.437.000	251.866.710.388	57.297.566.739	253.224.852.674	153.545.048.550	352.598.950.701
66	Kab. Tuban	2017	1.028.370.328.000	290.413.348.577	99.460.795.127	497.223.807.932	264.646.713.611	497.409.334.515
67	Kab. Tulungagung	2017	1.151.959.732.000	376.013.545.735	66.135.619.328	503.103.394.883	209.096.842.411	395.842.837.980
68	Kota Blitar	2017	421.212.306.000	91.001.449.167	50.365.609.429	194.764.731.103	63.715.979.878	174.989.696.378
69	Kota Kediri	2017	606.928.225.000	123.667.741.806	108.715.250.187	293.065.134.148	230.907.373.861	243.195.558.126
70	Kota Madiun	2017	502.392.070.000	77.267.422.860	59.314.388.974	230.608.717.369	305.857.486.594	255.977.976.513

71	Kota Malang	2017	844.576.426.000	216.458.586.565	113.684.568.188	588.276.962.084	305.005.705.627	340.494.355.167
72	Kota Mojokerto	2017	390.118.825.000	78.771.947.266	50.450.522.033	178.295.062.136	31.114.933.996	121.144.916.729
73	Kota Pasuruan	2017	424.499.789.000	70.449.544.490	45.395.556.419	147.981.423.536	106.672.474.116	220.001.016.826
74	Kota Probolinggo	2017	461.952.836.000	109.325.683.043	53.402.335.042	203.937.860.276	270.382.807.635	239.181.366.936
75	Kota Surabaya	2017	1.211.713.876.000	378.498.806.664	375.422.942.034	5.161.844.571.172	1.068.140.827.993	2.517.891.658.246
76	Kota Batu	2017	474.779.517.000	71.395.297.832	43.445.796.142	149.423.863.144	72.308.701.558	142.582.638.440
77	Kab. Bangkalan	2018	968.770.449.680	260.696.538.242	115.358.054.088	199.258.427.616	59.467.999.707	324.705.615.061
78	Kab. Banyuwangi	2018	1.375.784.247.000	423.717.990.705	161.490.144.982	450.066.949.215	82.072.711.541	480.382.663.298
79	Kab. Blitar	2018	1.109.812.753.000	382.043.194.822	107.643.357.347	252.453.245.801	137.609.170.014	409.773.750.053
80	Kab. Bojonegoro	2018	932.357.598.649	349.495.303.481	2.532.807.898.432	425.167.970.431	79.051.687.856	601.338.047.081
81	Kab. Bondowoso	2018	910.319.122.000	309.056.755.613	116.663.676.048	203.239.207.718	120.781.616.626	284.801.344.676
82	Kab. Gresik	2018	909.888.092.000	330.283.398.649	184.996.926.377	957.255.706.269	67.862.494.626	369.883.330.557
83	Kab. Jember	2018	1.697.477.217.000	478.354.824.047	171.575.657.659	597.509.388.023	649.555.523.036	532.247.571.649
84	Kab. Jombang	2018	1.091.779.457.000	341.135.141.100	126.344.163.414	438.197.175.439	228.373.317.014	293.715.521.337
85	Kab. Kediri	2018	1.225.331.641.000	406.576.707.166	137.139.936.519	476.905.008.818	473.605.797.114	547.123.553.524
86	Kab. Lamongan	2018	1.146.161.266.000	429.800.064.440	124.753.022.135	436.595.179.671	70.312.355.480	531.811.348.158
87	Kab. Lumajang	2018	972.852.929.000	306.661.771.652	111.198.914.831	270.169.877.127	185.336.398.823	288.428.035.221
88	Kab. Madiun	2018	877.862.289.224	303.837.979.055	104.646.553.666	219.041.431.267	120.464.879.752	291.642.038.612
89	Kab. Magetan	2018	899.960.340.000	278.740.644.408	101.432.502.987	196.826.063.936	46.948.204.448	194.944.111.688
90	Kab. Malang	2018	1.665.195.901.000	553.022.487.244	194.849.361.899	585.290.988.836	217.444.522.923	718.439.018.703
91	Kab. Mojokerto	2018	973.768.511.000	337.920.214.957	115.579.383.642	546.289.352.326	290.474.586.996	554.143.666.841
92	Kab. Nganjuk	2018	1.059.436.592.960	361.601.592.261	108.524.258.956	361.586.738.454	233.495.326.570	339.783.946.855
93	Kab. Ngawi	2018	1.039.619.057.000	334.579.617.361	111.935.345.666	223.871.715.022	266.102.224.965	307.436.987.487
94	Kab. Pacitan	2018	793.715.346.000	277.683.212.331	99.006.905.287	185.153.427.758	28.306.481.622	271.920.244.654
95	Kab. Pamekasan	2018	849.764.469.000	266.900.962.262	135.741.325.291	222.410.664.049	198.319.059.885	317.340.696.506

96	Kab. Pasuruan	2018	1.179.777.625.000	387.073.986.651	291.469.057.168	614.302.515.368	180.498.872.363	447.987.653.723
97	Kab. Ponorogo	2018	1.038.913.988.811	405.686.933.708	107.415.121.904	289.017.741.958	70.616.497.985	403.302.695.098
98	Kab. Probolinggo	2018	967.345.237.000	282.727.096.204	145.691.592.828	234.483.636.963	141.951.799.295	242.838.333.931
99	Kab. Sampang	2018	825.443.163.000	279.475.126.533	107.198.211.337	135.349.867.961	157.276.720.509	312.562.644.306
100	Kab. Sidoarjo	2018	1.191.856.625.000	415.805.733.813	185.811.982.977	1.685.558.666.147	583.992.202.844	810.565.148.333
101	Kab. Situbondo	2018	806.660.581.000	303.035.021.045	118.074.249.542	187.287.219.449	110.931.022.607	398.444.375.447
102	Kab. Sumenep	2018	1.144.489.870.000	318.164.202.097	138.648.346.524	185.832.755.753	289.410.514.391	353.711.734.989
103	Kab. Trenggalek	2018	885.545.437.000	290.488.992.985	101.859.297.437	233.808.792.639	153.545.048.550	311.421.059.015
104	Kab. Tuban	2018	1.027.874.285.222	311.052.055.461	154.291.392.724	442.531.646.744	264.646.713.611	494.963.683.321
105	Kab. Tulungagung	2018	1.151.959.732.000	438.491.758.679	111.227.009.078	453.153.465.280	209.096.842.411	370.661.902.571
106	Kota Blitar	2018	421.212.306.000	104.546.300.626	100.776.111.296	163.026.005.753	63.715.979.878	160.034.400.214
107	Kota Kediri	2018	606.558.865.000	111.321.491.483	162.363.535.388	249.093.229.531	230.907.373.861	133.226.151.028
108	Kota Madiun	2018	501.753.246.649	70.689.542.010	105.974.277.348	230.847.977.147	305.857.486.594	259.087.612.258
109	Kota Malang	2018	844.477.164.310	184.452.461.185	152.360.194.093	556.888.383.144	305.005.705.627	351.203.268.897
110	Kota Mojokerto	2018	378.916.109.000	74.274.872.665	99.934.360.176	182.508.304.189	31.114.933.996	119.434.272.447
111	Kota Pasuruan	2018	424.499.789.000	124.354.364.356	101.134.378.975	153.027.195.761	106.672.474.116	184.267.409.697
112	Kota Probolinggo	2018	461.402.648.000	102.056.324.513	103.360.369.258	175.789.670.859	270.382.807.635	162.786.989.163
113	Kota Surabaya	2018	1.211.713.876.000	398.797.386.102	478.358.706.741	4.972.890.868.136	1.068.140.827.993	2.430.061.039.309
114	Kota Batu	2018	474.881.106.000	77.838.891.013	96.523.674.774	162.574.646.582	72.308.701.558	125.401.338.968

LAMPIRAN 2

Data Penelitian Setelah Transformasi Logaritma Natural (LN)

No.	Kota/Kabupaten	Tahun	DAU	DAK	DBH	PAD	SiLPA	Belanja Modal
1	Kab. Bangkalan	2016	27,64	26,26	25,21	26,02	26,01	26,75
2	Kab. Banyuwangi	2016	27,97	26,60	25,22	26,63	26,64	27,54
3	Kab. Blitar	2016	27,75	26,72	24,94	26,14	26,37	27,26
4	Kab. Bojonegoro	2016	27,58	25,63	27,54	26,55	26,53	27,60
5	Kab. Bondowoso	2016	27,55	26,43	24,99	25,90	25,92	26,78
6	Kab. Gresik	2016	27,55	26,30	25,73	27,30	25,49	26,75
7	Kab. Jember	2016	28,17	26,79	25,66	26,99	26,80	26,86
8	Kab. Jombang	2016	27,74	26,37	25,17	26,65	26,54	26,62
9	Kab. Kediri	2016	27,85	26,46	25,30	26,55	26,96	27,14
10	Kab. Lamongan	2016	27,79	26,82	25,31	26,72	25,97	27,15
11	Kab. Lumajang	2016	27,62	26,15	24,96	26,21	26,47	26,58
12	Kab. Madiun	2016	27,52	26,53	24,84	25,82	26,26	26,82
13	Kab. Magetan	2016	27,54	26,30	24,82	25,83	25,84	26,38
14	Kab. Malang	2016	28,16	26,87	25,70	26,94	26,59	27,25
15	Kab. Mojokerto	2016	27,62	26,22	25,12	26,83	26,67	26,82
16	Kab. Nganjuk	2016	27,71	26,37	25,07	26,50	26,56	26,83
17	Kab. Ngawi	2016	27,69	26,54	25,03	26,00	26,57	26,60
18	Kab. Pacitan	2016	27,42	26,13	24,76	25,74	25,71	26,66
19	Kab. Pamekasan	2016	27,48	26,57	25,24	25,91	26,26	27,02
20	Kab. Pasuruan	2016	27,81	26,60	26,34	26,90	27,02	27,45
21	Kab. Ponorogo	2016	27,69	26,51	24,94	26,20	25,87	26,65
22	Kab. Probolinggo	2016	27,61	26,24	25,28	26,12	26,28	26,39
23	Kab. Sampang	2016	27,44	26,52	25,03	25,63	26,16	27,06
24	Kab. Sidoarjo	2016	27,83	26,45	25,78	27,92	27,08	27,42
25	Kab. Situbondo	2016	27,43	26,35	25,03	25,88	25,98	26,76
26	Kab. Sumenep	2016	27,74	26,36	25,58	26,07	26,40	26,33
27	Kab. Trenggalek	2016	27,53	26,24	24,91	25,93	26,18	26,62
28	Kab. Tuban	2016	27,68	26,35	25,50	26,62	26,41	26,86
29	Kab. Tulungagung	2016	27,79	26,89	25,06	26,56	26,38	27,08
30	Kota Blitar	2016	26,78	25,65	24,76	25,61	25,28	26,04
31	Kota Kediri	2016	27,15	25,32	25,56	26,20	27,01	26,67
32	Kota Madiun	2016	26,96	25,67	24,90	25,88	26,55	26,23
33	Kota Malang	2016	27,48	25,28	25,47	26,89	26,48	25,99
34	Kota Mojokerto	2016	26,71	25,36	24,74	25,75	25,87	26,44
35	Kota Pasuruan	2016	26,79	25,25	24,67	25,72	25,33	25,87

36	Kota Probolinggo	2016	26,88	25,15	24,81	25,87	26,42	25,72
37	Kota Surabaya	2016	27,84	26,41	26,75	29,04	27,98	28,21
38	Kota Batu	2016	26,90	25,26	24,66	25,42	25,24	25,88
39	Kab. Bangkalan	2017	27,63	26,67	25,07	26,51	24,81	26,41
40	Kab. Banyuwangi	2017	27,95	26,57	25,01	26,69	25,13	27,21
41	Kab. Blitar	2017	27,73	26,65	24,83	26,50	25,65	27,11
42	Kab. Bojonegoro	2017	27,56	25,91	27,38	26,83	25,09	27,07
43	Kab. Bondowoso	2017	27,54	26,54	24,92	26,16	25,52	26,67
44	Kab. Gresik	2017	27,53	26,29	25,77	27,49	24,94	26,77
45	Kab. Jember	2017	28,15	26,93	25,54	27,30	27,20	27,29
46	Kab. Jombang	2017	27,72	26,50	25,00	26,98	26,15	26,68
47	Kab. Kediri	2017	27,83	26,64	25,23	27,00	26,88	27,24
48	Kab. Lamongan	2017	27,77	26,06	25,05	26,79	24,98	26,95
49	Kab. Lumajang	2017	27,60	26,37	24,83	26,50	25,95	26,28
50	Kab. Madiun	2017	27,50	26,24	24,70	26,21	25,51	26,65
51	Kab. Magetan	2017	27,53	26,39	24,75	26,08	24,57	26,03
52	Kab. Malang	2017	28,14	26,95	25,58	27,33	26,11	27,33
53	Kab. Mojokerto	2017	27,60	26,46	24,82	26,94	26,39	27,08
54	Kab. Nganjuk	2017	27,69	26,67	24,87	26,53	26,18	26,49
55	Kab. Ngawi	2017	27,67	26,44	24,91	26,34	26,31	26,66
56	Kab. Pacitan	2017	27,40	26,18	24,69	26,03	24,07	26,57
57	Kab. Pamekasan	2017	27,47	26,72	25,19	26,22	26,01	26,64
58	Kab. Pasuruan	2017	27,80	26,65	26,22	27,36	25,92	26,92
59	Kab. Ponorogo	2017	27,67	26,51	24,88	26,45	24,98	26,87
60	Kab. Probolinggo	2017	27,59	26,41	25,21	26,43	25,68	26,51
61	Kab. Sampang	2017	27,43	26,16	24,73	26,07	25,78	26,65
62	Kab. Sidoarjo	2017	27,82	26,68	25,51	28,14	27,09	27,06
63	Kab. Situbondo	2017	27,42	26,09	24,98	26,15	25,43	26,57
64	Kab. Sumenep	2017	27,73	26,46	25,29	25,97	26,39	26,40
65	Kab. Trenggalek	2017	27,51	26,25	24,77	26,26	25,76	26,59
66	Kab. Tuban	2017	27,66	26,39	25,32	26,93	26,30	26,93
67	Kab. Tulungagung	2017	27,77	26,65	24,91	26,94	26,07	26,70
68	Kota Blitar	2017	26,77	25,23	24,64	26,00	24,88	25,89
69	Kota Kediri	2017	27,13	25,54	25,41	26,40	26,17	26,22
70	Kota Madiun	2017	26,94	25,07	24,81	26,16	26,45	26,27
71	Kota Malang	2017	27,46	26,10	25,46	27,10	26,44	26,55
72	Kota Mojokerto	2017	26,69	25,09	24,64	25,91	24,16	25,52
73	Kota Pasuruan	2017	26,77	24,98	24,54	25,72	25,39	26,12
74	Kota Probolinggo	2017	26,86	25,42	24,70	26,04	26,32	26,20
75	Kota Surabaya	2017	27,82	26,66	26,65	29,27	27,70	28,55
76	Kota Batu	2017	26,89	24,99	24,49	25,73	25,00	25,68

77	Kab. Bangkalan	2018	27,60	26,29	25,47	26,02	24,81	26,51
78	Kab. Banyuwangi	2018	27,95	26,77	25,81	26,83	25,13	26,90
79	Kab. Blitar	2018	27,74	26,67	25,40	26,25	25,65	26,74
80	Kab. Bojonegoro	2018	27,56	26,58	28,56	26,78	25,09	27,12
81	Kab. Bondowoso	2018	27,54	26,46	25,48	26,04	25,52	26,38
82	Kab. Gresik	2018	27,54	26,52	25,94	27,59	24,94	26,64
83	Kab. Jember	2018	28,16	26,89	25,87	27,12	27,20	27,00
84	Kab. Jombang	2018	27,72	26,56	25,56	26,81	26,15	26,41
85	Kab. Kediri	2018	27,83	26,73	25,64	26,89	26,88	27,03
86	Kab. Lamongan	2018	27,77	26,79	25,55	26,80	24,98	27,00
87	Kab. Lumajang	2018	27,60	26,45	25,43	26,32	25,95	26,39
88	Kab. Madiun	2018	27,50	26,44	25,37	26,11	25,51	26,40
89	Kab. Magetan	2018	27,53	26,35	25,34	26,01	24,57	26,00
90	Kab. Malang	2018	28,14	27,04	26,00	27,10	26,11	27,30
91	Kab. Mojokerto	2018	27,60	26,55	25,47	27,03	26,39	27,04
92	Kab. Nganjuk	2018	27,69	26,61	25,41	26,61	26,18	26,55
93	Kab. Ngawi	2018	27,67	26,54	25,44	26,13	26,31	26,45
94	Kab. Pacitan	2018	27,40	26,35	25,32	25,94	24,07	26,33
95	Kab. Pamekasan	2018	27,47	26,31	25,63	26,13	26,01	26,48
96	Kab. Pasuruan	2018	27,80	26,68	26,40	27,14	25,92	26,83
97	Kab. Ponorogo	2018	27,67	26,73	25,40	26,39	24,98	26,72
98	Kab. Probolinggo	2018	27,60	26,37	25,70	26,18	25,68	26,22
99	Kab. Sampang	2018	27,44	26,36	25,40	25,63	25,78	26,47
100	Kab. Sidoarjo	2018	27,81	26,75	25,95	28,15	27,09	27,42
101	Kab. Situbondo	2018	27,42	26,44	25,49	25,96	25,43	26,71
102	Kab. Sumenep	2018	27,77	26,49	25,66	25,95	26,39	26,59
103	Kab. Trenggalek	2018	27,51	26,39	25,35	26,18	25,76	26,46
104	Kab. Tuban	2018	27,66	26,46	25,76	26,82	26,30	26,93
105	Kab. Tulungagung	2018	27,77	26,81	25,43	26,84	26,07	26,64
106	Kota Blitar	2018	26,77	25,37	25,34	25,82	24,88	25,80
107	Kota Kediri	2018	27,13	25,44	25,81	26,24	26,17	25,62
108	Kota Madiun	2018	26,94	24,98	25,39	26,17	26,45	26,28
109	Kota Malang	2018	27,46	25,94	25,75	27,05	26,44	26,58
110	Kota Mojokerto	2018	26,66	25,03	25,33	25,93	24,16	25,51
111	Kota Pasuruan	2018	26,77	25,55	25,34	25,75	25,39	25,94
112	Kota Probolinggo	2018	26,86	25,35	25,36	25,89	26,32	25,82
113	Kota Surabaya	2018	27,82	26,71	26,89	29,24	27,70	28,52
114	Kota Batu	2018	26,89	25,08	25,29	25,81	25,00	25,55

LAMPIRAN 3

Uji Statistik Deskriptif

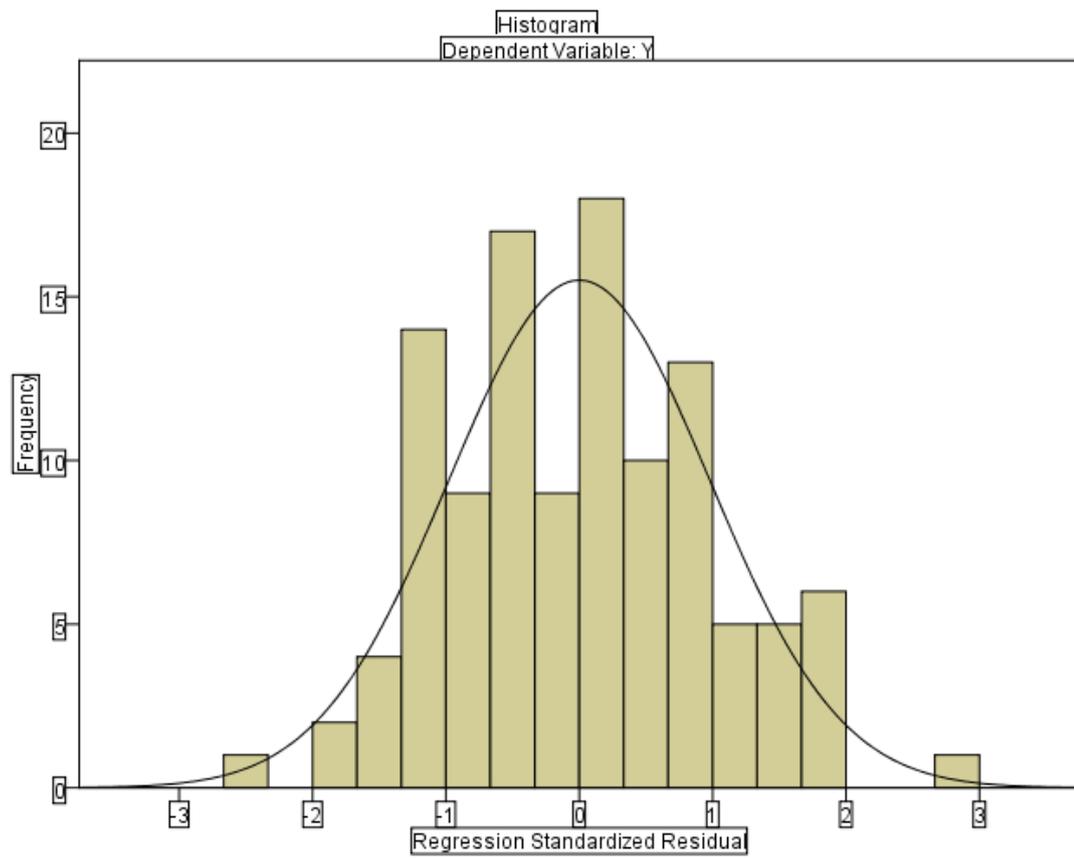
Descriptive Statistics

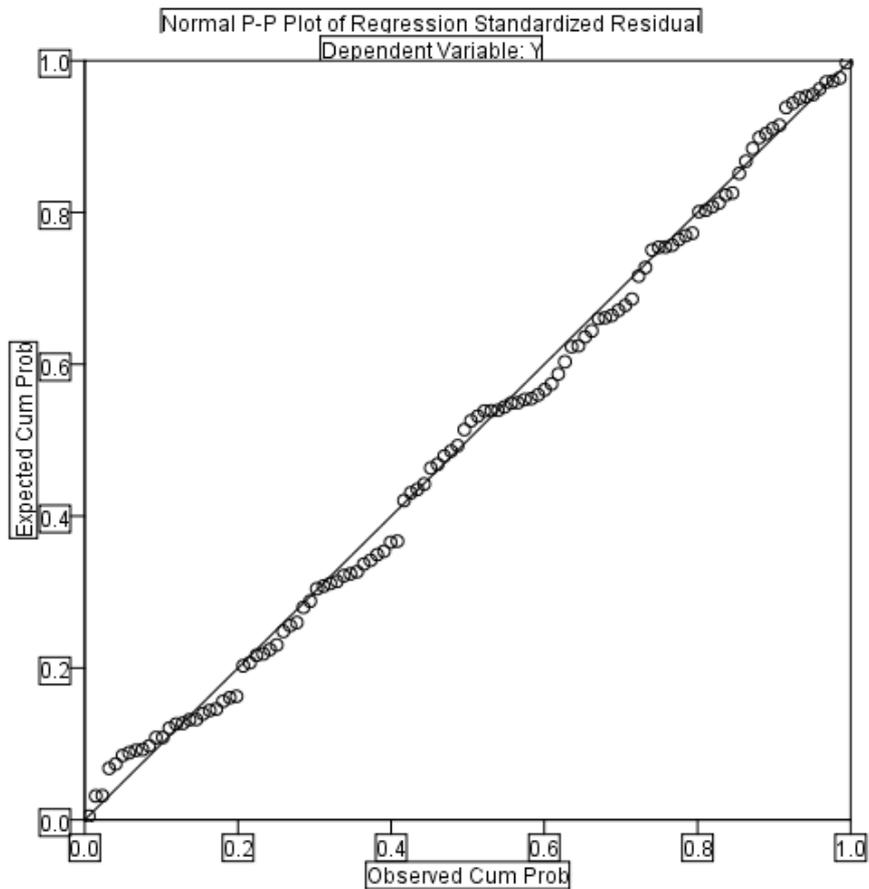
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	114	26.66	28.17	27.5251	.36091
X2	114	24.98	27.04	26.2474	.53396
X3	114	24.49	28.56	25.3635	.62200
X4	114	25.42	29.27	26.4961	.70872
X5	114	24.07	27.98	25.9541	.77373
Y	114	25.51	28.55	26.6637	.54385
Valid N (listwise)	114				

LAMPIRAN 4

Uji Normalitas Data

Charts





NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.27790668
Most Extreme Differences	Absolute	.048
	Positive	.048
	Negative	-.037
Test Statistic		.048
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

LAMPIRAN 5

Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	-.044	2.458		-.018	.986		
	X1	.122	.198	.081	.617	.538	.140	7.165
	X2	.351	.122	.345	2.883	.005	.169	5.910
	X3	.117	.053	.134	2.228	.028	.667	1.500
	X4	.263	.056	.343	4.716	.000	.458	2.185
	X5	.161	.042	.229	3.842	.000	.680	1.471

a. Dependent Variable: Y

LAMPIRAN 6

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

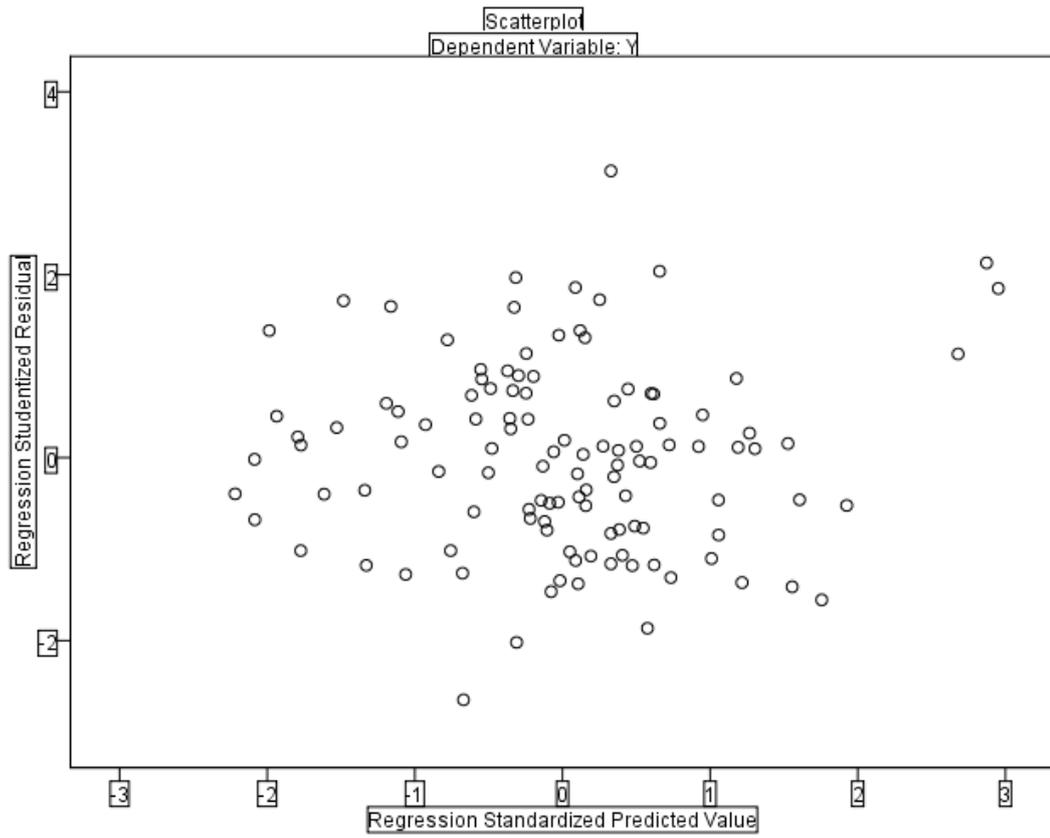
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.860 ^a	.739	.727	.28427	1.899

a. Predictors: (Constant), X5, X3, X2, X4, X1

b. Dependent Variable: Y

LAMPIRAN 7

Uji Heteroskedastisitas



LAMPIRAN 8

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X5, X3, X2, X4, X1 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,860 ^a	,739	,727	,28427

a. Predictors: (Constant), X5, X3, X2, X4, X1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	24,695	5	4,939	61,121	,000 ^b
	Residual	8,727	108	,081		
	Total	33,422	113			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X5, X3, X2, X4, X1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,044	2,458		-,018	,986
	X1	,122	,198	,081	,617	,538
	X2	,351	,122	,345	2,883	,005
	X3	,117	,053	,134	2,228	,028
	X4	,263	,056	,343	4,716	,000
	X5	,161	,042	,229	3,842	,000

a. Dependent Variable: Y

LAMPIRAN 9

Uji Statistik t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,044	2,458		-,018	,986
	X1	,122	,198	,081	,617	,538
	X2	,351	,122	,345	2,883	,005
	X3	,117	,053	,134	2,228	,028
	X4	,263	,056	,343	4,716	,000
	X5	,161	,042	,229	3,842	,000

a. Dependent Variable: Y

LAMPIRAN 10

Kartu Bimbingan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Imamah
 N.I.M : 1612321068
 Program Studi : Akuntansi
 Spesialisasi : Keuangan & Auditing
 Mulai Memprogram : Bulan Februari Tahun 2020
 Judul Skripsi : Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah
 Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap
 Belanja Modal Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa
 Timur
 Pembimbing Utama : Dra.Ec L. Tri Lestari, M.Si.
 PembimbingPendamping : Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak.

No	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1	23-03-2020	Bab I Kump	Nur	
2	11-04-2020	Bab I-III Acc	Nur	
3	12-04-2020	Bab I-III Revisi		
4	19-04-2020	Bab I-III Revisi		
5	29-04-2020	Bab I-III Revisi		
6	03-05-2020	Bab I-III Acc		
7	19-06-20	Bab IV+V Acc	Nur	
8	28-06-20	Bab W-V Revisi		
9	02-07-2020	Bab W-V Acc.		

Surabaya, 04 Februari 2020
 Mengetahui
 Ketua Program Studi Akuntansi

Arif Rahman, SE., M.Si.
 NIDN. 0722107604

